



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2025

**BPBD PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR**



Nomor : 300.2.1/59/BPBD-I/2026

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagai wujud pelaporan capaian strategis yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran telah dapat diselesaikan.

Dengan tersusunnya LKjIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur dapat diketahui hasil yang telah dicapai baik tugas pokok, fungsi dan peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam pelaksanaan Pembangunan di Daerah dan Dokumen ini merupakan proses akhir atau final dari serangkaian dokumen yang berkaitan dengan kinerja suatu Perangkat Daerah dan berpatokan kepada hasil analisis dan perbandingan dengan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025.

Diharapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur ini dapat menjadi salah satu referensi dalam upaya meningkatkan Kinerja pada tahun berikutnya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki dan yang terpenting memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dalam bentuk pertanggung jawaban yang disebut Akuntabilitas Kinerja.

LKjIP ini masih banyak kelemahan dan kekurangan sehingga dalam penyusunan perlu saran dan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak guna penyempurnaan di masa yang akan datang. Kepada semua pihak yang telah memberikan masukan, saran dan pendapat sehingga tersusunnya LKjIP ini, diucapkan terima kasih.

Semoga laporan ini menjadi sarana evaluasi dan perbaikan berkelanjutan dalam mewujudkan masyarakat Kalimantan Timur yang tangguh menghadapi bencana.

Samarinda, 26 Februari 2026
Kepala Pelaksana,



Buyung Dodi Gunawan, S.T., S.H., M.M
NIP. 197205282005021001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2025 menyajikan berbagai keberhasilan dan kegagalan capaian strategis yang ditunjukkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2025. Berbagai capaian tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Secara umum, beberapa capaian utama kinerja tahun 2021 - 2025 adalah sebagai berikut :

Capaian Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur

NO	INDIKATOR	CAPAIAN				TAHUN 2025		
		2021	2022	2023	2024	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Target RENSTRA 2019 – 2023								
1.	Prosentase penyelenggaraan penanggulangan bencana	98,04	100	100	-	-	-	-
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat	78,37	80,46	82,89	-	-	-	-
Target RENSTRA 2024 – 2026								
1.	Indeks Ketahanan Daerah	0,33	0,43	0,45	0,530	0,733	0,570	77,76
2.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	62,78	65,49	66,80	71,95	71,00	71,95	101,33
Target RENSTRA 2025 – 2029								
1.	Indeks Risiko Bencana	153,28	146,67	144,43	136,11	131,64 - 136,11	117,73	111,81 - 115.61
2.	Indeks Ketahanan Daerah	0,33	0,43	0,45	0,53	0,53	0,57	107,54
3.	Nilai AKIP Perangkat Daerah	62,78	65,49	66,80	70,70	72,00	71,95	99,93
4.	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	78,37	80,46	82,89	73,60	80	86,84	108,55

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ringkasan Eksekutif.....	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Dasar Pembentukan Organisasi.....	1
B. Tugas dan Fungsi.....	2
C. Struktur Organisasi.....	3
D. Sumber Daya Manusia	6
E. Aspek Strategis Organisasi	7
F. Permasalahan Utama (Isu Strategis).....	8
G. Sarana dan Prasarana	11
BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA.....	12
A. Perencanaan Strategis	11
B. Indikator Kinerja Utama	22
C. Perjanjian Kinerja	23
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	26
A. Laporan Hasil Evaluasi Atas Implementasi Sistem AKIP Tahun Sebelumnya	26
B. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi.....	33
C. Analisa Capaian Kinerja	46
D. Realisasi Anggaran	70
E. Daftar Penghargaan Tingkat Nasional.....	70
BAB IV PENUTUP	71
A. Kesimpulan Umum	71
B. Langkah Kedepan	72
C. Saran.....	72

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	6
Tabel 1.2	Klasifikasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Golongan	6
Tabel 1.3	Klasifikasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Berdasarkan Golongan.....	7
Tabel 1.4	Klasifikasi Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Tingkat Jabatan	7
Tabel 1.5	Klasifikasi Pegawai Dengan Perjanjian Kerja Berdasarkan Tingkat Jabatan .	7
Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 – 2026	13
Tabel 2.2	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 – 2029	13
Tabel 2.3	Sasaran dan Indikator Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 – 2026	14
Tabel 2.4	Sasaran dan Indikator Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 – 2029	15
Tabel 2.5	Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 – 2026	15
Tabel 2.6	Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 – 2029	16
Tabel 2.7	Kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 – 2026	17
Tabel 2.8	Kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 – 2029	20
Tabel 2.9	Program dan Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur	21
Tabel 2.10	Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 – 2026	22
Tabel 2.11	Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 – 2029	23

Tabel 2.12	Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur	25
Tabel 2.13	Target dan Realisasi Belanja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025	25
Tabel 2.14	Anggaran belanja sasaran strategis Tahun 2025.....	25
Tabel 3.1	Penilaian Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja BPBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 dan 2024	26
Tabel 3.2	Tindak lanjut atas rekomendasi laporan hasil evaluasi terhadap implementasi sistem AKIP Tahun 2024 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur	29
Tabel 3.3	Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2025	33
Tabel 3.4	Realisasi Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2021 – 2025	34
Tabel 3.5	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025	46
Tabel 3.6	Perbandingan realisasi Kinerja Tahun 2021 – 2025	47
Tabel 3.7	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Antar Provinsi	48
Tabel 3.8	Realisasi Kinerja Tahun 2025 Antar Capaian Kinerja Daerah dengan Pusat (Kementerian/Lembaga).....	48
Tabel 3.9	Realisasi Kinerja Tahun 2025 terhadap target akhir RENSTRA tahun 2024 – 2026 dan RENSTRA tahun 2025 – 2029	48
Tabel 3.10	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025	50
Tabel 3.11	Perbandingan realisasi Kinerja Tahun 2021 – 2025	53
Tabel 3.12	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Antar Provinsi	53
Tabel 3.13	Realisasi Kinerja Tahun 2025 terhadap target akhir RENSTRA tahun 2024 – 2026 dan RENSTRA tahun 2025 – 2029	54
Tabel 3.14	Tingkat Efisiensi Penyerapan Anggaran	55
Tabel 3.15	Efisiensi Penggunaan Anggaran Program/Kegiatan.....	56
Tabel 3.16	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Antar Provinsi	57
Tabel 3.17	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025	62

Tabel 3.18 Perbandingan realisasi Kinerja Tahun 2021 – 2025	62
Tabel 3.19 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Antar Perangkat Daerah	63
Tabel 3.20 Realisasi Kinerja Tahun 2025 terhadap target akhir RENSTRA tahun 2024 – 2026 dan RENSTRA tahun 2025 – 2029	63
Tabel 3.21 Tingkat Efisiensi Penyerapan Anggaran	64
Tabel 3.22 Efisiensi Penggunaan Anggaran Program/Kegiatan	65
Tabel 3.23 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Antar Provinsi	66
Tabel 3.24 Realisasi Anggaran Sesuai Dengan Perjanjian Kinerja	70
Tabel 3.19 Penilaian Kinerja Terbaik Tingkat Nasional	70

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Dokumentasi Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi....	58
Gambar 3.2	Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota Tahun 2025	59
Gambar 3.3	Pelaksanaan Pendistribusian Peralatan Penanggulangan Bencana pada BPBD Kabupaten/Kota tahun 2025.....	59
Gambar 3.4	Dokumentasi Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana BPBD Provinsi Kalimantan Timur.....	60
Gambar 3.5	Dokumentasi Kegiatan Pelayanan Pemenuhan Kebutuhan Logistik PB pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur	60
Gambar 3.6	Dokumentasi Kegiatan Pelayanan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	61
Gambar 3.7	Pelaksanaan Kegiatan Resiliensi Penanggulangan Bencana Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025	67
Gambar 3.8	Pelaksanaan Kegiatan Rapat Koordinasi Daerah Penanggulangan Bencana Se – Kalimantan Timur Tahun 2025	68

BAB I

PENDAHULUAN

A. DASAR PEMBENTUKAN ORGANISASI

Terbentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Timur didasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 13 Tahun 2009 tanggal 28 September 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang diundangkan pada tanggal 26 April 2007.

Dalam Bab III tentang Tanggung Jawab dan Wewenang, Pasal 5 menegaskan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Selanjutnya, Pasal 18 ayat (1) menyatakan bahwa “Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah”.

Pembentukan BPBD tersebut juga memperhatikan dasar-dasar hukum lainnya, antara lain:

1. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran serta Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
6. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Penanggulangan Bencana Daerah;
8. Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Urian Tugas Dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

B. TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tanggal 22 Oktober 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, pada Bab II mengenai Pembentukan, Kedudukan, Tugas, dan Fungsi BPBD Provinsi serta BPBD Kabupaten/Kota, Bagian Kedua tentang Kedudukan, Pasal 3 menyebutkan bahwa :

1. BPBD Provinsi dan BPBD Kabupaten/Kota berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah;
2. BPBD Provinsi dan BPBD Kabupaten/Kota dipimpin oleh Kepala Badan yang secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah.

Sesuai Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Urutan Tugas Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang penanggulangan bencana Daerah sesuai rencana strategis yang ditetapkan pemerintah Daerah;
2. Perencanaan, pengoordinasian, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang penanggulangan bencana Daerah;
3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang penanggulangan bencana Daerah;
4. Pengarahan pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
5. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
6. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang kedaruratan dan logistik;
7. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
8. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
9. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
10. Pelaksanaan fungsi dan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur yang berkaitan dengan tugasnya.

Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur adalah :

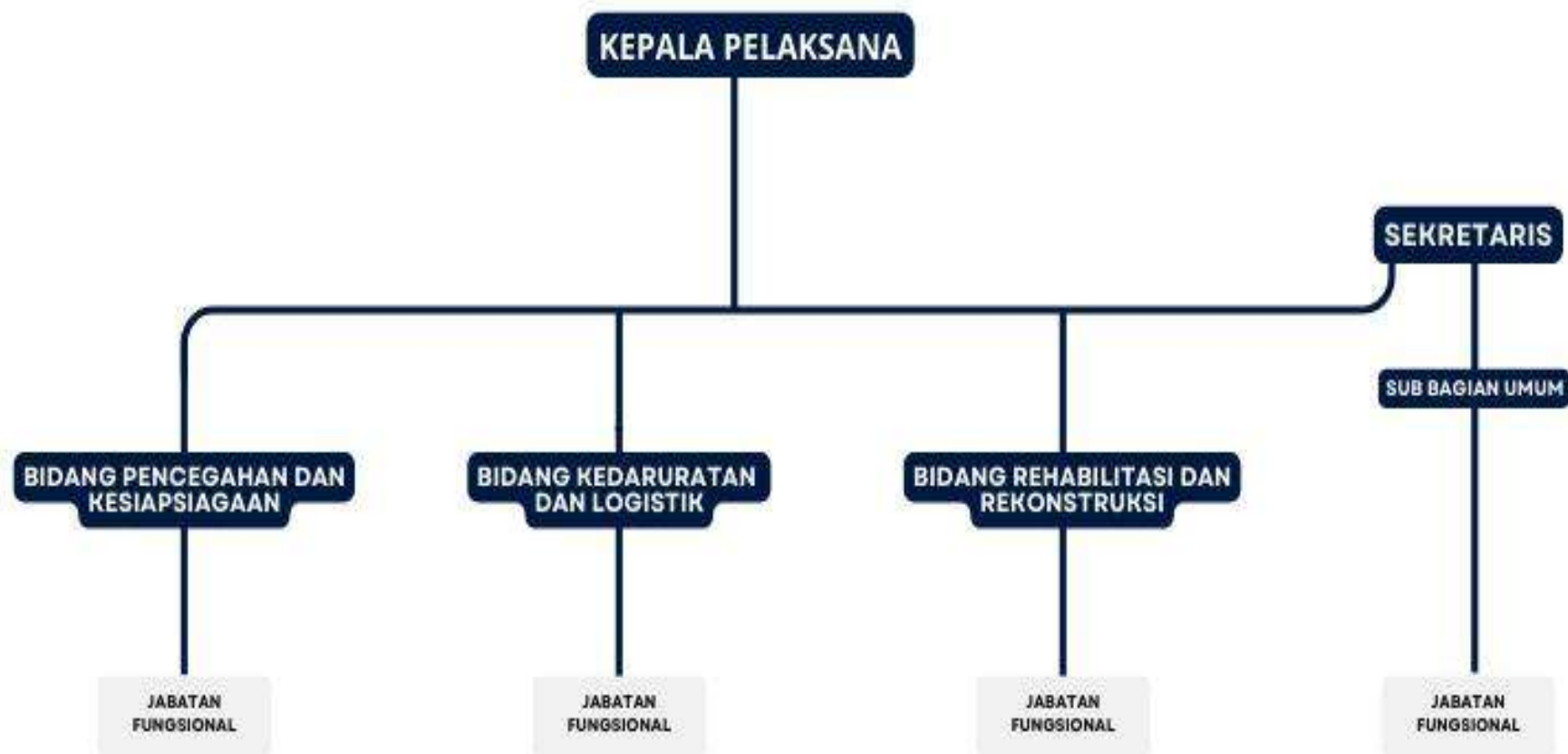
1. Merumuskan program kerja di lingkungan badan berdasarkan rencana strategis sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana;
3. Membina bawahan dengan cara mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yg diharapkan;
4. Mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
5. Menandatangani naskah dinas sesuai dengan kewenangannya untuk tertib administrasi;
6. Menyelenggarakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk koordinasi dan fasilitasi penanggulangan bencana;
7. Mengoordinasikan kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawasan penanggulangan bencana dan menetapkan standar operasional prosedur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
8. Melakukan kerjasama dalam penanggulangan bencana dengan instansi terkait, kabupaten/kota, instansi vertikal, antar provinsi dan mitra kerja berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk sinkronisasi program, kegiatan dan pendanaan;
9. Memfasilitasi kegiatan penanggulangan bencana sesuai dengan petunjuk pelaksanaan kegiatan agar penanganan permasalahan tepat sasaran;
10. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
11. Menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas kinerja badan; dan
12. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Gubernur baik lisan maupun tertulis.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Susunan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur terdiri dari:

- a. Kepala Pelaksana
- b. Sekretaris membawahi :
 - Subbag Umum
 - Pejabat Fungsional
- c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahi :
 - Pejabat Fungsional
- d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahi :
 - Pejabat Fungsional
- e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahi :
 - Pejabat Fungsional

Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur



D. SUMBER DAYA MANUSIA

Jumlah Sumber Daya Manusia pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam melaksanakan tugas terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai *Non* ASN dapat dilihat pada tabel sebagai berikut per **31 Desember 2025**:

Tabel 1.1
Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Jenis Pendidikan	Pria	Wanita	Sub Total
Tenaga ASN (PNS)				
1	SD	0	0	0
2	SMP	0	0	0
3	SMA	5	1	6
4	D1	0	0	0
5	D3	1	1	2
6	D4	0	0	0
7	S1	15	3	18
8	S2	8	1	9
9	S3	0	0	0
Jumlah		29	6	35
Tenaga ASN (PPPK)				
1	SD	0	0	0
2	SMP	0	0	0
3	SMA	24	5	29
4	D1	0	0	0
5	D3	1	1	2
6	D4	0	0	0
7	S1	17	5	22
8	S2	0	0	0
9	S3	0	0	0
Jumlah		42	11	53
Total Keseluruhan PNS & PPPK				88

Sumber: BPBD Provinsi Kaltim, Tahun 2025

Tabel 1.2
Klasifikasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Golongan

No.	Golongan	Pria	Wanita	Jumlah
1	I	0	0	0
2	II	2	1	3
3	III	19	5	24
4	IV	8	0	8
Jumlah Total		29	6	35

Sumber: BPBD Provinsi Kaltim, Tahun 2025

Tabel 1.3

Klasifikasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Berdasarkan Golongan

No.	Golongan	Pria	Wanita	Jumlah
1	V	24	5	29
2	VII	1	1	2
3	IX	17	5	22
Jumlah Total		42	11	53

*Sumber: BPBD Provinsi Kaltim, Tahun 2025***Tabel 1.4**

Klasifikasi Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Tingkat Jabatan

No.	Jenis Jabatan	Pria	Wanita	Jumlah
1	Kepala Pelaksana	1	0	1
2	Sekretaris	1	0	1
3	Kepala Bidang Pencegahan & Kesiapsiagaan	1	0	1
4	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik	0	0	0
5	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi	1	0	1
6	Kepala Sub Bagian Umum	1	0	1
7	Analisis Kebencanaan Ahli Muda	1	1	2
8	Analisis Kebencanaan Ahli Pertama	1	0	1
9	Perencana Ahli Muda	2	0	2
10	Analisis Kebijakan Ahli Muda	6	0	6
11	Penelaah Teknis Kebijakan	5	1	6
12	Pengolah Data dan Informasi	2	1	3
13	Pengadministrasian Perkantoran	7	3	10
Jumlah Total		29	6	35

*Sumber: BPBD Provinsi Kaltim, Tahun 2025***Tabel 1.5**

Klasifikasi Pegawai Dengan Perjanjian Kerja Berdasarkan Tingkat Jabatan

No.	Jenis Jabatan	Pria	Wanita	Jumlah
1	Analisis Kebencanaan Ahli Pertama	5	4	9
2	Penata Layanan Operasional	12	1	13
3	Pengelola Layanan Operasional	1	1	2
4	Operator Layanan Operasional	23	0	23
5	Pengadministrasian Perkantoran	1	5	6
Jumlah Total		42	11	53

*Sumber: BPBD Provinsi Kaltim, Tahun 2025***E. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI**

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur adalah perangkat daerah Provinsi yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana, atas dasar antara lain;

1. Kebijakan Pemerintah berdasarkan ;
 - a. Undang – Undang Nomor 24 tahun 2007 tanggal 26 April 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
 - b. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 13 tahun 2009 tanggal 28 September 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Karakteristik bencana yang potensi terjadi di Provinsi Kalimantan Timur seperti: Bencana Asap akibat kebakaran hutan dan lahan, bencana banjir, maupun potensi bencana lainnya;
3. Paradigma Penanggulangan bencana sebelum BPBD Provinsi Kalimantan Timur dibentuk yang menangani penanggulangan bencana hanya Sakorlak dan penanganannya hanya pada saat terjadinya bencana, dengan dibentuknya BPBD Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan UU No. 4 th 2007 manajemen penanganan bencana dari pencegahan kesiapsiagaan, penanganan darurat sampai dengan pasca bencana disamping itu terjadi urusan bersama (pemerintah, lembaga dunia usaha, masyarakat/LSM);
4. Kerusakan Sumber Daya Alam Kalimantan Timur;
5. Diperlukannya Perangkat Daerah yang mampu mengkoordinasi Perangkat Daerah terkait, lembaga dunia usaha dan masyarakat/LSM agar berjalan sesuai dengan fungsi/tupoksinya.

F. PERMASALAHAN UTAMA (ISU STRATEGIS)

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur Dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana dihadapkan dengan permasalahan yang cukup kompleks dari faktor lingkungan internal dan faktor eksternal, adapun penjelasannya sebagai berikut:

a. Permasalahan Internal

1. Kekuatan
 - Tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas dan profesional di bidang penanggulangan bencana;
 - Tersedianya sarana dan prasarana penunjang keberhasilan penanggulangan bencana di dalam melakukan pelayanan publik;
 - Tersedianya sumber anggaran pada setiap tahunnya;
 - Tersedianya regulasi yang mendukung dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;

- Dimilikinya pemimpin yang kuat, semangat dan tanggungjawab, dimana pemimpin yang memiliki semangat tentang pekerjaannya atau kehidupannya akan memotivasi anggota tim untuk bekerja lebih giat serta bertanggungjawab.

2. Kelemahan

- Lemahnya Koordinasi baik untuk antar SKPD dan antara pimpinan dengan bawahan, masih adanya keegoisan sektoral diantara bidang-bidang;
- Rendahnya komitmen dalam melaksanakan tugas dan kegiatan yang diembankan kepada bawahan dan belum sinergi dalam penyusunan dan pelaksanaan program dan kegiatan antar bidang di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
- Kurangnya sumber daya peralatan penanggulangan bencana baik dari jenis, kemampuan, kuantitas, dan kualitas;
- Terbatasnya SDM baik dari segi jumlah dan kemampuan individu dalam menghadapi tantangan kondisi alam perubahaniklim dan cuaca, hal ini disebabkan masih lemahnya jumlah tenaga yang profesional dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana;
- Kompetensi SDM yang masih belum sesuai untuk tugas- tugas PB sehingga menyebabkan kualitas dan kapasitas personil yang ada tidak merata;
- Kurangnya lahan untuk menampung kendaraan operasional;
- Masih rendah pemberian penghargaan (*reward*) bagi sumber daya manusia yang berprestasi di bidangnya dan diperlukan pemberian sanksi (*punishment*) dari pimpinan terhadapbawahan yang dipimpinnya bagi sumberdaya manusia yang melalaikan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada bawahan;
- Belum lengkapnya standar operasional prosedur dari berbagai bidang serta belum dilaksanakan standar operasional prosedur secara utuh;
- Belum optimalnya fungsi pengawasan, *monitoring* dan evaluasiserta masih lambatnya penyampaian laporan kepada pimpinan secara berjenjang.

b. Permasalahan Eksternal

1. Peluang

- Adanya kemitraan luar negeri dalam penanggulangan bencana baik berupa manajemen kebencanaan dan penanggulangannya serta dibukanya peluang mengikutsertakan sumber daya manusia Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur untuk mengikuti program magang ke luar negeri untuk penanggulangan bencana;
- Adanya kemitraan dalam penanggulangan bencana baik dari pemerintah, dalam hal ini Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan *stakeholder* mitra penanggulangan bencana meliputi dunia usaha, lembaga usaha masyarakat dan Forum Kaltim Peduli Bencana;
- Adanya kemudahan dalam mengakses pemanfaatan teknologi informasi kebencanaan dengan memanfaatkan *website* penanggulangan bencana;
- Adanya kepercayaan masyarakat, dukungan DPRD pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam penanggulangan bencana;
- Adanya program prioritas desa tangguh bencana yang menjadi program unggulan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

2. Ancaman

- Sangat luasnya cakupan wilayah pengawasan dan fenomena alam yang sulit diprediksi;
- Beratnya medan dan susah akses untuk mencapai lokasi bencana mengakibatkan risiko kerja sangat tinggi;
- Banyaknya masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana;
- Masyarakat mudah terpengaruh *HOAX* (kemajuan teknologi);
- Fasilitas pendukung yang mulai beralih ke era digital;
- Eksploitasi sumber daya alam yang tidak memerhatikan kelestarian lingkungan;
- Penggunaan dan pemanfaatan hutan dan lahan yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Timur.

G. SARANA DAN PRASARANA

Penyediaan prasarana dan sarana penanggulangan bencana sangat diperlukan guna mendukung kegiatan rutin maupun operasional. Sebagai institusi yang keberadaannya sangat penting, sangat diperlukan fasilitas kantor yang memadai untuk meningkatkan kinerja aparatur. Sarana dan prasarana BPBD Provinsi Kalimantan Timur berasal dari pengadaan BPBD sendiri, dari Hibah Provinsi Kalimantan Timur maupun bantuan atau hibah dari BNPB. Prasarana dan sarana penunjang yang dimiliki oleh BPBD Provinsi Kalimantan Timur selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 4.

BAB II

PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur mempunyai rencana strategi yang mencakup tujuan, sasaran serta kebijakan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang ingin dicapai mengacu pada Renstra periode peralihan Kepala Daerah tahun 2024 – 2026 dan Penetapan Kepala Daerah periode tahun 2025 - 2029.

1. Tujuan

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur merupakan dasar Penyusunan Kebijakan, Program, Indikator (tolak ukur kinerja) kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur, memiliki tujuan berdasarkan masing-masing pada periode Renstra 2024 – 2026 dan 2025 – 2029, sebagai berikut:

A. Renstra periode peralihan Kepala Daerah tahun 2024 – 2026

Tujuan 4 “Mewujudkan Birokrasi Pemerintah berAKHLAK yang berorientasi pada Pelayanan Publik, dengan **Sasaran 11** “Terwujudnya Birokrasi yang akuntabel”.

B. Renstra Periode Penetapan Kepala Daerah tahun 2025 - 2029.

Tujuan 1 “Terwujudnya Kaltim Sukses”, dengan **Sasaran 4** “Terlaksananya Pembangunan Berkelanjutan”.

2. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yang akan dihasilkan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran harus menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai. Adapun Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur merumuskan tujuan dan sasaran rencana strategis untuk terwujudnya tujuan dan sasaran yang telah dicanangkan dalam waktu 2024 – 2026 dan 2025 – 2029 beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 2.1. sebagaimana berikut ini :

Tabel 2.1

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 – 2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE -		
				1	2	3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pengurangan Risiko Bencana		Indeks Risiko Bencana	144,47	143,47	142,47
		Peningkatan Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	0,633	0,733	0,833
2	Mewujudkan Birokrasi Pemerintah yang Akuntabel dan memiliki pelayanan publik berkualitas		Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	70,01 (BB)	71,00 (BB)	72,00 (BB)
		Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan layanan publik perangkat daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	70,01 (BB)	71,00 (BB)	72,00 (BB)

Tabel 2.2

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 – 2029

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE -					
				1	2	3	4	5	6
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Tercapainya Pengurangan Risiko Bencana		Indeks Risiko Bencana	131,64 – 136,11	127,17 – 131,64	122,70 – 127,17	118,23 – 122,70	113,76 – 114,56	108,83 – 113,76

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE -					
				1	2	3	4	5	6
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Meningkatkan Ketahanan Daerah Dalam Menghadapi Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	0,530	0,550	0,570	0,590	0,610	0,620
		Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Layanan Publik BPBD Prov. Kaltim	Nilai AKIP Perangkat Daerah	72,00	73,45	75,20	76,95	78,70	80,45
			Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	80	82	84	86	88	90

3. Indikator Kinerja

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Adapun Indikator Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan sasaran yang telah direncanakan dalam periode tahun 2024 – 2026 dan 2025 – 2029 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3

Sasaran dan Indikator Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 – 2026

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
1	Peningkatan Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana	Indeks Ketahanan Daerah
2	Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan layanan publik perangkat daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Tabel 2.4

Sasaran dan Indikator Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 – 2029

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR
1	Tercapainya Pengurangan Risiko Bencana	Indeks Risiko Bencana
2	Meningkatkan Ketahanan Daerah Dalam Menghadapi Bencana	Indeks Ketahanan Daerah
3	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Layanan Publik BPBD Prov. Kaltim	Nilai AKIP Perangkat Daerah
		Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah

4. Strategi

Strategi merupakan cara yang akan dilaksanakan dalam mencapai sasaran yang telah ditentukan. Strategi yang akan dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur untuk mencapai sasarnya yang telah direncanakan dalam periode tahun 2024 – 2026 dan 2025 – 2029 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5

Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2024 – 2026

NO	SASARAN	STRATEGI
1	Peningkatan Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana	- Penguatan Sistem Strategi dan Tata Kelola Pencegahan dan Penguatan ketahanan bencana di daerah rawan bencana - Penguatan Kedaruratan dan Logistik dalam koordinasi, Dan komando penanganan darurat, serta Penguatan Tata Kelola Logistik dan Peralatan Daerah

NO	SASARAN	STRATEGI
		- Penguatan sumber daya pendampingan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana - Penguatan Data Laporan, Informasi dan Operasional Penanggulangan Bencana
2	Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan layanan publik perangkat daerah	- Penguatan sistem kendali internal secara berjenjang, dipantau secara berkala - Penguatan sistem pengumpulan data capaian kinerja yang bisa dipertanggung jawabkan secara administrasi internal serta memanfaatkan hasil pengukuran - Penguatan sistem penyajian informasi kinerja, penggunaan sumber daya, untuk perbaikan perencanaan, pelaksanaan program/kegiatan serta peningkatan kinerja berkelanjutan - Penguatan sistem komunikasi kepada pihak yang berkepentingan dengan pihak terkait langsung terhadap hasil evaluasi untuk ditindaklanjuti

Tabel 2.6

Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 – 2029

NO	SASARAN	STRATEGI
1	Meningkatkan Ketahanan Daerah Dalam Menghadapi Bencana	Peningkatan sistem mitigasi dan peringatan dini yang andal, Inovatif, Kolaboratif dan Implementatif serta

NO	SASARAN	STRATEGI
		Peningkatan kesiapsiagaan pemerintah daerah, lembaga usaha, masyarakat, Akademisi dan media yang terkoordinasi dalam menghadapi bencana
		Peningkatan penanganan bencana yang cepat, tepat dan terkoordinasi, serta peningkatan pemenuhan kebutuhan logistik dan peralatan sesuai standar teknis pelayanan dan standar kebutuhan minimal
		Peningkatan layanan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca Bencana dalam pencapaian kebutuhan dasar dan kehidupan masyarakat di wilayah terdampak bencana yang berkualitas
2	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Layanan Publik BPBD Prov. Kaltim	Peningkatan kualitas layanan perencanaan, keuangan, umum, dan kepegawaian

5. Arah Kebijakan

Kebijakan merupakan arah tindakan yang diambil untuk menentukan setiap program dan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran. Arah Kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang telah direncanakan dalam periode tahun 2024 – 2026 dan 2025 – 2029 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2024 – 2026

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	Pengurangan Risiko Bencana	Peningkatan Kapasitas Daerah dalam	- Penguatan Sistem Strategi dan Tata Kelola	- Peningkatan sistem dan strategi pencegahan yang andal, Inovatif, Kolaboratif dan Implementatif dan

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		Penanggulangan Bencana	Pencegahan dan Penguatan ketahanan bencana di daerah rawan bencana - Penguatan Kedaruratan dan Logistik dalam koordinasi, Dan komando penanganan darurat, serta Penguatan Tata Kelola Logistik dan Peralatan Daerah - Penguatan sumber daya pendampingan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana - Penguatan Data Laporan, Informasi dan Operasional Penanggulangan Bencana	kesiapsiagaan pemerintah daerah, lembaga usaha, masyarakat, Akademisi dan media, lembaga usaha, yang terkoordinasi dalam menghadapi bencana - Peningkatan layanan darurat bencana yang cepat, tepat, dan terkoordinasi, Penyediaan logistik dan peralatan layanan darurat bencana penanggulangan bencana serta pengembangan jaringan sesuai standar kebutuhan minimal dan karakteristik wilayah - Peningkatan layanan pendampingan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana guna mendukung pencapaian kebutuhan dasar dan kehidupan masyarakat di wilayah terdampak bencana yang berkualitas - Peningkatan layanan distribusi informasi, komunikasi dan koordinasi guna mendukung penanggulangan bencana agar dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien
2	Mewujudkan Birokrasi Pemerintah yang Akuntabel dan memiliki	Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan layanan publik perangkat daerah	- Penguatan sistem kendali internal secara berjenjang, dipantau secara berkala	- Peningkatan analisa perbaikan perencanaan dalam membangun kepedulian, pemahaman dan berkomitmen dalam merumuskan perencanaan kinerja

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	pelayanan publik berkualitas		- Penguatan sistem pengumpulan data capaian kinerja yang bisa dipertanggung jawabkan secara administrasi internal serta memanfaatkan hasil pengukuran - Penguatan sistem penyajian informasi kinerja, penggunaan sumber daya, untuk perbaikan perencanaan, pelaksanaan program/kegiatan serta peningkatan kinerja berkelanjutan - Penguatan sistem komunikasi kepada pihak yang berkepentingan dengan pihak terkait langsung terhadap hasil evaluasi untuk ditindaklanjuti	- Peningkatan kepedulian/peran aktif setiap pengelola dan update dalam pengumpulan, pengukuran kinerja (PK) serta menyampaikan analisa/permasalahan/solusi pencapaian kinerja serta memberikan reward dan punishment atas capaian kinerja - Peningkatan penyajian informasi kinerja yang berkualitas, komperhensif, dan terukur terhadap realisasi anggaran, dan efisiensi Penggunaan Sumber Daya dan pemanfaatan informasi untuk target kinerja tahun berikutnya - Peningkatan Evaluasi internal dilaksanakan sesuai standar, dilakukan pendalaman, dilaksanakan pada seluruh pihak yang terkait

Tabel 2.8

Kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2025 – 2029

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	Tercapainya Pengurangan Risiko Bencana	Meningkatkan Ketahanan Daerah Dalam Menghadapi Bencana	Peningkatan sistem mitigasi dan peringatan dini yang andal, Inovatif, Kolaboratif dan Implementatif serta Peningkatan kesiapsiagaan pemerintah daerah, lembaga usaha, masyarakat, Akademisi dan media yang terkoordinasi dalam menghadapi bencana	Penguatan Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana dikawasan rawan bencana
			Peningkatan penanganan bencana yang cepat, tepat dan terkoordinasi, serta peningkatan pemenuhan kebutuhan logistik dan peralatan sesuai standar teknis	Penguatan Kedaruratan, Logistik dan Peralatan dalam sistem Komando penanganan bencana
			Peningkatan layanan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca Bencana dalam pencapaian kebutuhan dasar dan kehidupan masyarakat di wilayah terdampak bencana yang berkualitas	Penguatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Layanan Publik BPBD Prov. Kaltim	Peningkatan kualitas layanan perencanaan, keuangan, umum, dan kepegawaian	Penguatan layanan kesekretariatan dalam capaian kinerja

6. Program

Berikut ini adalah uraian program dan kegiatan yang telah ditentukan berdasarkan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Tabel 2.9

Program dan Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur

NO	PROGRAM	KEGIATAN
1	Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi
		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
2	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

NO	PROGRAM	KEGIATAN
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Berdasarkan penetapan Rencana Perangkat Daerah (RPD) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 – 2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029, maka BPBD Provinsi Kalimantan Timur telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama sebagaimana table dibawah ini:

Tabel 2.10

Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 – 2026

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	SUMBER DATA
1	Peningkatan Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,733	0,570	77,76	BPBD Kabupaten/Kota
2	Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan layanan publik perangkat daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai	71,00 (BB)	71,95 (BB)	101,33	LHE Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 2.11

Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 – 2029

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	SUMBER DATA
1	Tujuan : Penurunan Risiko Bencana	Indeks Risiko Bencana	Indeks	131,64 – 136,11	117,73	111,81 – 115,61	Buku IRBI
	Sasaran 1 : Meningkatkan Ketahanan Daerah Dalam Menghadapi Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,53	0,57	107,54	Buku IRBI
	Sasaran 2 : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Layanan Publik BPBD Prov. Kaltim	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	72,00	71,95	99,93	LHE Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur
		Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Indeks	80	86,84	108,55	Survei Masyarakat

C. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja pada dasarnya merupakan pernyataan komitmen pimpinan dalam merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Pada tahun 2025 perjanjian kinerja masih berpedoman pada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 dan Rencana Kerja (RENJA) BPBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025.

Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian *reward* atau penghargaan dan *punishment* atau sanksi. Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.12

Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Provinsi Kalimantan Timur

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
Peningkatan Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,733
Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan layanan publik perangkat daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai	71,00 (BB)

1. Rencana Anggaran Tahun 2025

Pada Tahun Anggaran 2025, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan kegiatan dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) murni sebesar Rp. 57.731.734.000,-. Berdasarkan kebijakan efisiensi belanja sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 serta Instruksi Gubernur Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBD Provinsi Kalimantan Timur, dilakukan penyesuaian sehingga pagu anggaran menjadi sebesar Rp. 54.914.030.050,-. Pada Anggaran Perubahan tahun 2025, BPBD Provinsi Kalimantan Timur tidak memperoleh tambahan alokasi anggaran, namun terdapat belanja yang berpotensi menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sehingga dilakukan pergeseran anggaran untuk mendukung efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan. Adapun capaian realisasi anggaran BPBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp. 51.065.405.766,- atau mencapai 92,99% dari total pagu anggaran yang tersedia.

2. Target Dan Realisasi Belanja

Tabel 2.13

Target dan Realisasi Belanja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025

NO	URAIAN	TAHUN ANGGARAN 2025		
		ANGGARAN BELANJA (Rp)	REALISASI BELANJA (Rp)	%
1	Belanja Operasi	54.634.232.834	50.833.681.316	93,04
2	Belanja Modal	279.797.218	231.724.450	82,82
JUMLAH		54.914.030.050	51.065.405.766	92,99

3. Alokasi Anggaran Sasaran Strategis

Tabel 2.14

Anggaran belanja sasaran strategis Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS & RUTIN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	%	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Peningkatan Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana	34.141.460.835	33.018.835.947	96,71	Total Anggaran APBD Sebesar Rp. 54.914.030.052
2	Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan layanan publik perangkat daerah	20.772.569.217	18.046.569.819	86,88	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. LAPORAN HASIL EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SISTEM AKIP TAHUN SEBELUMNYA

1. Penilaian Hasil Evaluasi Akuntabilitas

Hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2023 dan 2024 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Penilaian Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja BPBD Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2023 dan 2024

KOMPONEN YANG DINILAI	BOBOT (%)	HASIL PENILAIAN EVALUASI		SELISIH
		TAHUN 2023	TAHUN 2024	
Perencanaan Kinerja	30,00	22,20	23,10	0,90
Pengukuran Kinerja	30,00	14,80	21,00	6,20
Pelaporan Kinerja	15,00	6,10	10,35	4,25
Evaluasi Kinerja Internal	25,00	14,00	17,50	3,50
Capaian Kinerja	-	13,60	-	-
Total	100,00	70,70	71,95	1,25
Predikat Penilaian			BB	

2. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Implementasi Sistem AKIP

Pelaksanaan Evaluasi Implementasi Sistem AKIP adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*Outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya Pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan untuk peningkatan kualitas.

Hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 memperoleh nilai sebesar 71,95 (tujuh puluh satu koma sembilan puluh lima) atau dengan predikat "BB" dengan interpretasi "Sangat Baik". Hal tersebut diakibatkan kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan Pemerintahan yang belum berorientasikan pada hasil *core business* di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Adapun komponen penilaian yang perlu mendapat penyempurnaan dan perbaikan yaitu :

a. Perencanaan Kinerja

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur telah menyusun dokumen perencanaan kinerja yang mencakup Rencana Strategis

(Renstra), Rencana Kerja (Renja) dan Perjanjian Kinerja (PK). Dokumen perencanaan tersebut mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur/Rencana Pembangunan Daerah (RPD) periode 2024-2026. Disamping itu sudah terdapat pemetaan kolaborasi (crosscutting) antar Perangkat Daerah.

Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan kinerja, yaitu: 1 (satu) Indikator kinerja utama masih belum memenuhi kriteria Spesifik dan *Measurable* (Terukur), pada Indikator Indeks Ketahanan Daerah (IKD). Dimana ukuran IKD diperoleh dari kolaborasi PD terkait dan rekapitulasi hasil capaian Kabupaten/Kota atau merupakan hasil dari pemenuhan kapasitas Penanggulangan Bencana di 10 Kabupaten/Kota, (terdiri 7 parameter, 7 prioritas, dan 71 indikator).

b. Pengukuran Kinerja

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur telah melakukan pengukuran kinerja secara berkala. Pengukuran kinerja telah dilakukan melalui aplikasi e-SAKIP dan e-Kinerja (SKP) serta adanya SOP Monitoring dan Evaluasi Kinerja dan SOP Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja. Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment.

Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan untuk pengukuran kinerja, yaitu:

- Terdapat informasi pengukuran kinerja pada e-SAKIP yang belum disesuaikan dengan target kinerja beberapa pegawai pada PK/SKP;
- Data dukung kinerja sebagian besar belum dilengkapi/diinput dalam aplikasi e-SAKIP/e-Kinerja.

c. Pelaporan Kinerja

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur telah menyusun laporan kinerja (LKJIIP) Tahun 2024, telah di formalkan, direviu, dipublikasikan dan disampaikan tepat waktu. Disamping itu, laporan kinerja telah memberi informasi mengenai perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan, target jangka menengah dan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya, telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja di level provinsi (Benchmark

Kinerja). Serta telah menginformasikan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya.

Namun demikian, masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam pelaporan kinerja (LKJIP) diantaranya sebagai berikut :

- a. Penyajian informasi kinerja pada bab III belum selaras yaitu analisis perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 terhadap target akhir RENSTRA pada Tabel 3.8 Hal 40 serta Tabel 3.15 Hal.52. Dan juga belum menyajikan Perbandingan target sasaran Nilai AKIP;
- b. Informasi dalam laporan kinerja yang belum sepenuhnya menjadi kepedulian seluruh pegawai, contohnya beberapa pegawai tidak secara aktif mengumpulkan data kinerja sebagai bahan penyusunan LKJIP dan disiplin melakukan pengimputan pada e-SAKIP. Hal ini terlihat adanya ketidaksesuaian capaian kinerja pegawai antara yang disajikan pada LKJIP dengan e-SAKIP;
- c. Laporan Kinerja belum menginformasikan secara rinci terkait analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.

d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur telah melakukan monitoring dan evaluasi kinerja serta memiliki pedoman teknis evaluasi akuntabilitas kinerja internal serta melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas Kinerja internal.

Namun demikian, masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam evaluasi akuntabilitas kinerja Internal, yaitu hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal yang dilaksanakan belum memadai. Contohnya hasil evaluasi internal hanya sampai level program belum mengevaluasi terkait sasaran kinerja strategis di level eselon II.

3. Rekomendasi atas hasil evaluasi

Terhadap kondisi di atas, direkomendasikan kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur beserta seluruh jajaran agar melakukan perbaikan sebagai berikut:

a. Perencanaan Kinerja

Melakukan review Indikator Kinerja Utama yaitu Indeks Ketahanan Daerah (IKD) disesuaikan dengan tugas dan fungsi/kewenangan BPBD Prov. Kaltim

dan dapat berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

b. Pengukuran Kinerja

Pengukuran capaian target kinerja masing-masing pegawai mengacu pada target kinerja pada PK/SKP masing-masing Pegawai serta capaian kinerja dilengkapi/diinput data dukung yang relevan pada aplikasi e-SAKIP/e-Kinerja.

c. Pelaporan Kinerja

- Disusun lebih cermat dan memperhatikan keselarasan khususnya dalam menyajikan informasi analisis kinerja pada Bab. III;
- Berdasarkan pengumpulan data yang andal dengan kepedulian semua pegawai secara aktif/tertib dalam mengumpulkan/pengimputan data kinerja pada aplikasi e-SAKIP sebagai bahan penyusunan LKJIP sehingga informasi kinerja yang disajikan dalam laporan kinerja (LKjIP) selaras dengan hasil pengukuran pada e-SAKIP;
- Dilengkapi informasi mengenai analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.

d. Capaian Kinerja

Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dilakukan secara memadai, yaitu dengan melakukan evaluasi sampai pada sasaran strategis eselon II dan memuat permasalahan/kendala, analisis, dan rekomendasi dalam laporan evaluasi kinerja, sehingga dapat dimanfaatkan untuk perbaikan/peningkatan kinerja.

Tabel 3.2

Tindak lanjut atas rekomendasi laporan hasil evaluasi terhadap implementasi sistem AKIP
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2024

NO	REKOMENDASI	RENCANA TINDAK LANJUT	OUTPUT	TARGET WAKTU
PERENCANAAN KINERJA				
1	Melakukan revidi Indikator Kinerja Utama yaitu Indeks Ketahanan Daerah (IKD) disesuaikan dengan tugas dan fungsi/kewenangan BPBD Prov. Kaltim dan dapat berkoordinasi	1. Melakukan koordinasi dengan BNPB dalam menentukan IKU BPBD Prov. Kaltim agar selaras dengan pusat	Dokumen	Triwulan II

NO	REKOMENDASI	RENCANA TINDAK LANJUT	OUTPUT	TARGET WAKTU
	dengan Badan Perencanaan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.	2. Melakukan koordinasi dan Konsultasi dengan Bappeda Provinsi Kaltim terhadap Tujuan dan Sasaran BPBD Prov Kaltim		
PENGUKURAN KINERJA				
1	Pengukuran capaian target kinerja masing-masing pegawai mengacu pada target kinerja pada PK/SKP masing-masing Pegawai serta capaian kinerja dilengkapi/diinput data dukung yang relevan pada aplikasi e-SAKIP/e-Kinerja.	Menginstruksikan pada ASN melalui Nota dinas terhadap pengisian di aplikasi e sakip kaltim beserta bukti dukung dan melakukan Monev secara berkala dan menjadi bahan laporan untuk ditindak lanjuti oleh pimpinan	Nota Dinas	Triwulan IV
PELAPORAN KINERJA				
1	Agar Laporan Kinerja (LKjIP): - Disusun lebih cermat dan memperhatikan keselarasan khususnya dalam menyajikan informasi analisis kinerja pada Bab. III; - Berdasarkan pengumpulan data yang andal dengan kepedulian semua pegawai secara aktif/tertib dalam mengumpulkan/pengimputan data kinerja pada aplikasi e-SAKIP sebagai bahan penyusunan LKjIP sehingga informasi kinerja yang disajikan dalam laporan kinerja (LKjIP) selaras dengan hasil pengukuran pada e-SAKIP;	1. Membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2025 pada bab III akan disesuaikan dengan arahan dan masukan tim evaluator 2. BPBD Telah melakukan monitoring dan evaluasi e sakip pegawai dengan meminta kepada ess III untuk aktif memantau ASN dalam pengisian capaian kinerja di e sakip 3. Membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2025 akan memberikan informasi berupa faktor pendukung, faktor pendorong, dan faktor penghambat dari analisis	Laporan	Triwulan IV

NO	REKOMENDASI	RENCANA TINDAK LANJUT	OUTPUT	TARGET WAKTU
	- Dilengkapi informasi mengenai analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.	efisiensi atas penggunaan sumber daya (anggaran) dari tahun 5 tahun terakhir.		
EVALUASI KINERJA INTERNAL				
1	Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dilakukan secara memadai, yaitu dengan melakukan evaluasi sampai pada sasaran strategis eselon II dan memuat permasalahan/kendala, analisis, dan rekomendasi dalam laporan evaluasi kinerja, sehingga dapat dimanfaatkan untuk perbaikan/peningkatan kinerja.	1. Melakukan Monev secara berkala dan menjadi bahan laporan untuk ditindak lanjuti oleh pimpinan 2. Membuat Laporan Kinerja per Triwulan	Laporan	Per Triwulan

1. REKOMENDASI : Melakukan review Indikator Kinerja Utama yaitu Indeks Ketahanan Daerah (IKD) disesuaikan dengan tugas dan fungsi/kewenangan BPBD Provinsi Kaltim dan dapat berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

HASIL TINDAK LANJUT : Penetapan IKU BPBD Provinsi Kalimantan Timur harus selaras dengan kebijakan antara Pusat dan Daerah, dari penyusunan RPJMN, RPJMD hingga Renstra PD, dimana sebagai tujuan dari BNPB berkewajiban menurunkan Indeks Risiko Bencana sebesar 1,2 % yang berimplikasi pada penurunan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) pada setiap Provinsi di Indonesia, untuk mendukung hal tersebut, maka Pemerintah Provinsi wajib mencantumkan tujuan kerjanya yaitu Pengurangan Indeks Risiko Bencana (IRB) dengan sasaran adalah peningkatan Indeks Ketahanan Daerah (IKD).

- 2. REKOMENDASI** : Pengukuran capaian target kinerja masing-masing pegawai mengacu pada target kinerja pada PK/SKP masing-masing Pegawai serta capaian kinerja dilengkapi/diinput data dukung yang relevan pada aplikasi e-SAKIP/e-Kinerja.
- HASIL TINDAK LANJUT** : BPBD telah melakukan mekanisme pengukuran kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja (PK) dan Indikator Kinerja Individu (IKI) yang telah dibuat dan ditandatangani, namun masih terdapat perbedaan dalam penginputan indikator pada aplikasi E-Sakip dan E-Kin, hal ini menjadi bahan perbaikan selanjutnya untuk dilakukan penyesuaian melalui kegiatan sosialisasi dan sinkronisasi termasuk bukti dukung kinerja.
- 3. REKOMENDASI** : Agar Laporan Kinerja (LKjIP):
- Disusun lebih cermat dan memperhatikan keselarasan khususnya dalam menyajikan informasi analisis kinerja pada Bab. III;
 - Berdasarkan pengumpulan data yang andal dengan kepedulian semua pegawai secara aktif/tertib dalam mengumpulkan/pengimputan data kinerja pada aplikasi e-SAKIP sebagai bahan penyusunan LKjIP sehingga informasi kinerja yang disajikan dalam laporan kinerja (LKjIP) selaras dengan hasil pengukuran pada e-SAKIP;
 - Dilengkapi informasi mengenai analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.
- HASIL TINDAK LANJUT** : BPBD telah melakukan penyesuaian sistematika penyajian data sesuai atas rekomendasi dari tim evaluator pada dokumen LAKIP tahun 2025,
- 4. REKOMENDASI** : Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dilakukan secara memadai, yaitu dengan melakukan evaluasi sampai pada sasaran strategis eselon II dan memuat permasalahan/kendala, analisis, dan rekomendasi dalam laporan evaluasi kinerja, sehingga dapat dimanfaatkan untuk perbaikan/peningkatan kinerja.
- HASIL TINDAK LANJUT** : BPBD telah melakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal secara periodik (Triwulan) dengan menambahkan

permasalahan/kendala, analisis, dan rekomendasi perbaikan, dan telah dijadikan untuk perbaikan/peningkatan capaian target kinerja

B. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari sasaran strategis beserta target dan capaian realisasinya sebagai berikut :

Tabel 3.3
Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN	TRIWULAN	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Peningkatan Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,733	Triwulan I	0	0	0
					Triwulan II	0	0	0
					Triwulan III	0	0	0
					Triwulan IV	0,733	0,570	77,76
2	Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan layanan publik perangkat daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai	71,00 (BB)	Triwulan I	0	0	0
					Triwulan II	0	0	0
					Triwulan III	71,00	71,95	101,34
					Triwulan IV	0	0	0

Tabel 3.4
Realisasi Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2021 – 2025

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Pagu 2025 (APBD)		Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Realisasi 2025		Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	Tingkat Capaian Kinerja Dan Anggaran (%) 2025	
									Triwulan IV				K	RP
			K	RP										
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)	(7)	(8)		(9)	(10)	(11)	
01.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	85 Indeks	20.772.569.217	-	-	-	86,60	93,85	17.730.659.879	Tidak ada kendala	Tidak ada kendala	110,41	86,88
		Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	80 %		-	-	-	100	100		Tidak ada kendala	Tidak ada kendala	100	
1.05.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Dan Penganggaran Yang Ditetapkan Tepat Waktu	100 %	497.822.223	100	100	100	100	100	476.626.947	Tidak ada kendala	Tidak ada kendala	100	95,74
1.05.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	208.374.025	10	10	10	6	6	207.653.129	Tidak ada kendala	Tidak ada kendala	100	99,65
1.05.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	24.413.000	-	-	-	1	1	24.345.821	Tidak ada kendala	Tidak ada kendala	100	99,72
1.05.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	23.993.171	-	-	-	1	1	23.872.796	Tidak ada kendala	Tidak ada kendala	100	99,50
1.05.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	1 Dokumen	2.675.671	-	-	-	1	1	2.669.000	Tidak ada kendala	Tidak ada kendala	100	99,75

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Pagu 2025 (APBD)		Re ali sa si 20 21	Re ali sa si 20 22	Re ali sa si 20 23	Re ali sa si 20 24	Realisasi 2025		Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	Tingkat Capaian Kinerja Dan Anggaran (%) 2025			
									Triwulan IV				K	RP	K	RP
			K	RP												
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)	(7)	(8)		(9)	(10)	(11)			
		Penyusunan Dokumen DPA-SKPD														
1.05.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2.623.671	-	-	-	1	1	2.623.500	Tidak ada kendala	Tidak ada kendala	100	99,99		
1.05.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan CapaianKinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan	105.775.440	5	5	5	6	6	85.604.680	Tidak ada kendala	Tidak ada kendala	100	80,93		
1.05.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	129.967.245	3	3	3	3	3	129.858.021	Tidak ada kendala	Tidak ada kendala	100	99,92		
1.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Mendapatkan Layanan Administrasi Keuangan Tepat Waktu	100 %	15.202.221.693	100	100	100	100	100	12.903.758.685	Tidak ada kendala	Tidak ada kendala	100	84.88		
1.05.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	97 Orang/Bulan	14.725.804.403	12 Lap	12 Lap	43	49	97	12.445.254.685	Tidak ada kendala	Tidak ada kendala	100	84.51		
1.05.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	378.360.000	12	12	12	12	12	364.560.000	Tidak ada kendala	Tidak ada kendala	100	96.35		

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Pagu 2025 (APBD)		Re ali sa si 20 21	Re ali sa si 20 22	Re ali sa si 20 23	Re ali sa si 20 24	Realisasi 2025		Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	Tingkat Capaian Kinerja Dan Anggaran (%) 2025	
			K	RP					Triwulan IV				K	RP
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)	(7)	(8)		(9)	(10)	(11)	
1.05.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	36.338.430	-	-	12	12	12	32.954.500	Tidak ada kendala	Tidak ada kendala	100	90.69
1.05.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	27.920.000	-	-	12	12	12	27.598.000	Tidak ada kendala	Tidak ada kendala	100	98.85
1.05.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	12 Dokumen	5.607.944	-	-	-	12	12	5.528.000	Tidak ada kendala	Tidak ada kendala	100	98.57
1.05.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	4 Laporan	12.853.944	-	-	-	12	4	12.665.000	Tidak ada kendala	Tidak ada kendala	100	98.53
1.05.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4 Dokumen	15.336.972	-	-	-	12	4	15.198.500	Tidak ada kendala	Tidak ada kendala	100	99.10
1.05.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	43.960.000	100	100	100	100	100	43.518.000	Tidak ada kendala	Tidak ada kendala	100	98,99
1.05.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	480.000	-	-	-	1	1	469.000	Tidak ada kendala	Tidak ada kendala	100	97,71

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Pagu 2025 (APBD)		Re ali sa si 20 21	Re ali sa si 20 22	Re ali sa si 20 23	Re ali sa si 20 24	Realisasi 2025		Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	Tingkat Capaian Kinerja Dan Anggaran (%) 2025			
									Triwulan IV				K	RP	K	RP
			K	RP												
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)	(7)	(8)		(9)	(10)	(11)			
1.05.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	43.020.000	-	-	-	1	1	42.600.000	Tidak ada kendala	Tidak ada kendala	100	99,02		
1.05.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	460.000	-	-	-	1	1	449.000	Tidak ada kendala	Tidak ada kendala	100	97,61		
1.05.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100 %	15.212.247	100	100	100	100	100	14.961.000	Tidak ada kendala	Tidak ada kendala	100	98,35		
1.05.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	0	75	75	7	0	0	0	Tidak ada kendala	Tidak ada kendala	0	0		
1.05.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen	480.000	-	-	-	4	4	480.000	Tidak ada kendala	Tidak ada kendala	100	100		
1.05.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen	480.000	-	-	-	2	2	468.000	Tidak ada kendala	Tidak ada kendala	100	97,50		
1.05.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	18 Orang	10.408.247	-	-	-	18	18	10.240.000	Tidak ada kendala	Tidak ada kendala	100	98,38		
1.05.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	25 Orang	3.844.000	-	-	-	25	25	3.773.000	Tidak ada kendala	Tidak ada kendala	100	98,15		

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Pagu 2025 (APBD)		Re ali sa si 20 21	Re ali sa si 20 22	Re ali sa si 20 23	Re ali sa si 20 24	Realisasi 2025		Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	Tingkat Capaian Kinerja Dan Anggaran (%) 2025	
									Triwulan IV					
			K	RP					K	RP			K	RP
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)	(7)	(8)		(9)	(10)	(11)	
1.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Fasilitas Operasional Kantor	100 %	782.719.205	100	100	100	100	100	781.881.411	Tidak ada kendala	Tidak ada kendala	100	99,89
1.05.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.848.563	-	-	-	1	1	2.848.200	Tidak ada kendala	Tidak ada kendala	100	99,99
1.05.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	239,617,731	10 unit	10 unit	18	10	8	239.277.950	Tidak ada kendala	Tidak ada kendala	100	99,86
1.05.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	14 Paket	144.376.051	12 Lap	12 Lap	12 Lap	22	14	143.914.290	Tidak ada kendala	Tidak ada kendala	100	99,68
1.05.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	27.186.220	-	-	-	7	7	27.178.900	Tidak ada kendala	Tidak ada kendala	100	99,97
1.05.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	143 Laporan	362.992.000	262	262	184	145	143	362.973.571	Tidak ada kendala	Tidak ada kendala	100	99,99
1.05.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	6 Dokumen	5.218.640	-	-	-	6	6	5.208.500	Tidak ada kendala	Tidak ada kendala	100	99,81
1.05.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	480.000	-	-	-	-	1	480.000	Tidak ada kendala	Tidak ada kendala	100	100,00

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Pagu 2025 (APBD)		Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Realisasi 2025		Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	Tingkat Capaian Kinerja Dan Anggaran (%) 2025			
									Triwulan IV				K	RP	K	RP
			K	RP												
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)		(9)	(10)	(11)				
1.05.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0	0	100	100	100	-	100	0	-	-	0	0		
1.05.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	0	-	-	-	-	0	0	Tidak ada kendala	Tidak ada kendala	0	0		
1.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kelancaran Pelaksanaan Urusan Kantor	100 %	3.344.116.936	100	100	100	100	100	2.946.146.580	Tidak ada kendala	Tidak ada kendala	100	88,10		
1.05.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.590.000	-	-	-	1	1	1.590.000	Tidak ada kendala	Tidak ada kendala	100	100,00		
1.05.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	429.017.700	12	12	12	12	12	330.438.090	Tidak ada kendala	Tidak ada kendala	100	77,02		
1.05.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.913.509.236	12	12	12	12	12	2.614.118.490	Tidak ada kendala	Tidak ada kendala	100	89,72		
1.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	886.516.913	100	100	100	100	100	879.677.196	Tidak ada kendala	Tidak ada kendala	100	98,23		

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Pagu 2025 (APBD)		Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Realisasi 2025		Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	Tingkat Capaian Kinerja Dan Anggaran (%) 2025			
									Triwulan IV				K	RP	K	RP
			K	RP												
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)	(7)	(8)		(9)	(10)	(11)			
1.05.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	44 Unit	767.495.940	21	21	10	44	44	760.782.696	Tidak ada kendala	Tidak ada kendala	100	99,13		
1.05.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	44 Unit	66.822.500	64	64	50	173	44	66.819.500	Tidak ada kendala	Tidak ada kendala	100	100,00		
1.05.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	2 Unit	2.933.333	-	-	-	2	2	2.930.000	Tidak ada kendala	Tidak ada kendala	100	99,89		
1.05.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	49.265.140	1701 m2	1701 m2	8	1	3	49.145.000	Tidak ada kendala	Tidak ada kendala	100	99,76		
1.05.03	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	100 %	34.141.460.835		-	-	100	100	33.018.835.947	Tidak ada kendala	Tidak ada kendala	75	96,71		
		Persentase Pemulihan Pasca Bencana	100 %			-	-	100	100		Tidak ada kendala	Tidak ada kendala	75			
		Persentase Penanganan Pra Bencana	100 %			-	-	100	100		Tidak ada kendala	Tidak ada kendala	75			

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Pagu 2025 (APBD)		Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Realisasi 2025		Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	Tingkat Capaian Kinerja Dan Anggaran (%) 2025	
									Triwulan IV					
			K	RP					K	RP			K	RP
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)	(7)	(8)		(9)	(10)	(11)	
1.05.03.1.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	Tersedianya fasilitator KIE di setiap Kabupaten/Kota	100 %	88.722.204	100	88,76	100	100	100	74.589.670	Tidak ada kendala	Tidak ada kendala	100	84.07
1.05.03.1.01.0002	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparaturnya di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang menerima sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana (per jenis ancaman) lintas Kabupaten/Kota	40 Orang	88.722.204	-	-	-	20	40	74.589.670	Tidak ada kendala	Tidak ada kendala	100	84.07
1.05.03.1.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100 %	20.780.996.354		100	80	100	100	19.909.479.862	Tidak ada kendala	Tidak ada kendala	100	95,81
1.05.03.1.02.0013	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana	Jumlah laporan yang memuat kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategisKabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	4 Kawasan	259.647.770		4 Desa/Kelurahan	4 Desa/Kelurahan	13	4	221.129.160	Tidak ada kendala	Tidak ada kendala	100	85,17
1.05.03.1.02.0014	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Dokumen Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) dengan proses bisnis dan prosedur tetap yang dilegalkan	3 Dokumen	19.920.100.690	12	12 Lap	12 dokumen	13	3	19.159.718.513	Tidak ada kendala	Tidak ada kendala	100	96,18

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Pagu 2025 (APBD)		Re ali sa si 20 21	Re ali sa si 20 22	Re ali sa si 20 23	Re ali sa si 20 24	Realisasi 2025		Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	Tingkat Capaian Kinerja Dan Anggaran (%) 2025			
									Triwulan IV				K	RP	K	RP
			K	RP												
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)	(7)	(8)		(9)	(10)	(11)			
		danmendapatkan dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana														
1.05.03.1.02.0015	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	Jumlah personil TRC tingkat Provinsi yang memiliki sertifikasi kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	30 Orang	165.312.074	30	30	120	30	30	141.872.515	Tidak ada kendala	Tidak ada kendala	100	85,82		
1.05.03.1.02.0016	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparatur di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/Kota yangmeningkat kemampuan dan ketrampilannya dalam pencegahan dan mitigasi bencana	30 Orang	145.411.610	-	-	-	20	30	124.150.260	Tidak ada kendala	Tidak ada kendala	100	85,08		
1.05.03.1.02.0019	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga negara dan aparatur di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/Kota yang terlibat geladi kesiapsiagaanmenge tahu dan memahami mekanisme dan prosedur tetap (SOP) pengendalian operasi penanganan darurat bencana	1000 Orang	153.858.060	-	-	2	400	1000	142.485.904	Tidak ada kendala	Tidak ada kendala	100	92,61		
1.05.03.1.02.0021	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah keluarga yang berada di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang	60 Keluarga	136.666.150	-	-	9842	60	60	120.553.510	Tidak ada kendala	Tidak ada kendala	100	88,21		

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Pagu 2025 (APBD)		Re ali sa si 20 21	Re ali sa si 20 22	Re ali sa si 20 23	Re ali sa si 20 24	Realisasi 2025		Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	Tingkat Capaian Kinerja Dan Anggaran (%) 2025	
									Triwulan IV					
			K	RP					K	RP			K	RP
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)	(7)	(8)		(9)	(10)	(11)	
		memperoleh peralatan perlindungan diridan kesiapsiagaan terhadap bencana												
1.05.03.1.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100 %	812.651.330	100	100	100	100	100	792.112.099	Tidak ada kendala	Tidak ada kendala	100	97,47
1.05.03.1.03.0002	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	10 Laporan	501.059.330	12	12	12	10	10	485.633.500	Tidak ada kendala	Tidak ada kendala	100	99,86
1.05.03.1.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	12 Laporan	42.594.000	-	-	-	12	12	42.440.000	Tidak ada kendala	Tidak ada kendala	100	98,81
1.05.03.1.03.0004	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	800 Orang	268,998,000	12	12	1000	800	800	264.038.599	Tidak ada kendala	Tidak ada kendala	100	96,86
1.05.03.1.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	100 %	12.459.090.947	79,36	79,36	100	100	100	12.238.738.816	Tidak ada kendala	Tidak ada kendala	100	98,23
1.05.03.1.04.0006	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	60 Keluarga	58.729.530	-	-	-	60	60	52.954.195	Tidak ada kendala	Tidak ada kendala	100	90,01

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Pagu 2025 (APBD)		Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Realisasi 2025		Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	Tingkat Capaian Kinerja Dan Anggaran (%) 2025			
									Triwulan IV				K	RP	K	RP
			K	RP												
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)	(7)	(8)		(9)	(10)	(11)			
1.05.03.1.04.0007	Penanganan Pasca Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi PascaBencana (R3P) yang Disusun	7 Dokumen	12.229.929.717	3 Lap	3 Lap	2	6	7	12.229.929.717	Tidak ada kendala	Tidak ada kendala	100	98.65		
1.05.03.1.04.0016	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah	Jumlah Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	1 Dokumen	2.289.470	-	-	-	1	1	2.289.470	Tidak ada kendala	Tidak ada kendala	100	99.98		
1.05.03.1.04.0017	Penyusunan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah dan jenis Data dan Informasi Kebencanaan yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)	1 Dokumen	18.497.500	-	-	1	1	1	18.279.471	Tidak ada kendala	Tidak ada kendala	100	100.00		
1.05.03.1.04.0018	Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah	Jumlah Dokumen yang dilegalkan	2 Dokumen	781.000	-	-	2	2	2	781.000	Tidak ada kendala	Tidak ada kendala	100	96.05		
1.05.03.1.04.0019	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Jumlah dokumen kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di seluruh tahapan(pra, saat dan pascabencana)	1 Dokumen	30.712.000	-	-	-	2	1	30.712.000	Tidak ada kendala	Tidak ada kendala	100	96.50		
1.05.03.1.04.0020	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal SPM Sub	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan dalam Penerapan Standar	10 Kab/Kota	118.151.730	-	-	-	10	10	70.034.450	Tidak ada kendala	Tidak ada kendala	100	59.28		

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Pagu 2025 (APBD)		Re ali sa si 20 21	Re ali sa si 20 22	Re ali sa si 20 23	Re ali sa si 20 24	Realisasi 2025		Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	Tingkat Capaian Kinerja Dan Anggaran (%) 2025	
									Triwulan IV					
			K	RP					K	RP			K	RP
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)	(7)	(8)		(9)	(10)	(11)	
	Urusan Bencana Kabupaten/Kota	Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota												
GRAND TOTAL				54.914.030,052						51,065,405,766				92,99

Dari ringkasan capaian kinerja beberapa sasaran di atas dapat dilihat bahwa ada sasaran yang telah dapat memenuhi target yang telah ditetapkan, namun ada pula sasaran yang realisasi atau capaiannya belum memenuhi target yang telah ditetapkan.

C. Analisa Capaian Kinerja

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja tahun 2025, analisis pencapaian kinerja, keberhasilan/kegagalan, hambatan/ kendala yang dihadapi akan diuraikan sebagai berikut:

1. TUJUAN Pengurangan Risiko Bencana

Tujuan :

Pengurangan Risiko Bencana

Tujuan ini dimaksudkan untuk menggambarkan serangkaian upaya sistematis untuk mengurangi kerentanan dan ancaman bencana, sekaligus meningkatkan kapasitas masyarakat dan pemerintah dalam menghadapi potensi bencana. Konsep ini menekankan bahwa bencana bukan hanya fenomena alam, tetapi juga hasil dari kerentanan sosial, ekonomi, dan tata kelola, pada tingkat Provinsi nilai Indeks Risiko Bencana merupakan nilai rata-rata perolehan dari nilai IRB Kabupaten/Kota dengan cara perhitungan sebagai berikut :

Rumus Dasar :

$$IRB = \frac{H \times V}{C}$$

Provinsi :

$$\frac{\text{Nilai IRB 10 Kabupaten/Kota}}{\sum \text{Total Kabupaten/Kota se – kaltim}}$$

Tabel 3.5

Target dan Realiasi Kinerja Tahun 2025

NO	INDIKATOR KINIERJA	SATUAN	TARGET 2025	TAHUN 2025	
				REALISASI	% CAPAIAN
1	Indeks Risiko Bencana	Indeks	143,47	117,73	121,86

Tabel 3.6
Perbandingan realisasi Kinerja Tahun 2021 – 2025

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2021 – 2025	REALISASI					% Peningkatan / Penurunan Tahun 2024
				2021	2022	2023	2024	2025	
1	Indeks Risiko Bencana	Indeks	152,49	153,28	-	-	-	-	Penurunan
			151,49	-	146,67	-	-	-	-6,61
			150,49	-	-	144,43	-	-	-2,24
			144,47	-	-	-	136,11	-	-8,32
			143,47	-	-	-	-	177,73	18,38

Indeks Risiko Bencana (IRB) Provinsi Kalimantan Timur setiap tahunnya menunjukkan penurunan yang cukup signifikan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Keberhasilan pengurangan IRB tersebut dipengaruhi oleh semakin menguatnya kapasitas ketahanan daerah, yang tercermin dalam peningkatan kesiapsiagaan, efektivitas koordinasi antar lembaga, serta partisipasi aktif masyarakat dalam upaya pengurangan risiko bencana.

Metode perhitungan Indeks Risiko Bencana (IRB) mengalami perubahan *baseline* data bahaya dan kerentanan. Sejak tahun 2025, perhitungan IRB telah menggunakan *baseline* bahaya dan kerentanan tahun 2021, sedangkan pada tahun-tahun sebelumnya (hingga 2024) masih menggunakan *baseline* bahaya dan kerentanan tahun 2013. Perubahan *baseline* ini berdampak pada konsistensi pencapaian target pengurangan risiko bencana, karena target yang ditetapkan masih mengacu pada *baseline* tahun 2013. Dengan demikian, meskipun terjadi penurunan IRB yang signifikan, pencapaian target pengurangan risiko bencana perlu dianalisis secara hati-hati agar tetap relevan dengan kondisi bahaya dan kerentanan terbaru.

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Risiko Bencana (IRB) tahun 2025, Provinsi Kalimantan Timur memperoleh nilai sebesar 117,73. Nilai tersebut menempatkan tingkat risiko bahaya Provinsi Kalimantan Timur pada zona sedang. hal ini menggambarkan bahwa IRB Provinsi Kalimantan Timur tidak berada pada posisi tinggi, namun tetap waspada terhadap ancaman bencana. Dari 13 potensi bencana 5 diantaranya yang sering terjadi dan diwaspadai antara lain bencana banjir, tanah longsor, cuaca ekstrem, Karhutla, dan kekeringan.

Tabel 3.7
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Antar Provinsi

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALIASI	TINGKAT PENCAPAIAN
Provinsi Kalimantan Timur					
1	Indeks Risiko Bencana	Indeks	143,47	117,73	121,86
Provinsi Kalimantan Utara					
2	Indeks Risiko Bencana	Indeks	157,62	121,35	129,89

Dalam rangka pemantauan kinerja daerah terkait pengurangan risiko bencana, telah dilakukan pengukuran Indeks Risiko Bencana pada dua provinsi, yaitu Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

Pada Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, masing – masing daerah mampu menurunkan melebihi dari target IRB yang ditentukan. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat risiko bencana di wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara mencerminkan adanya upaya nyata dalam penguatan kapasitas daerah terhadap pengurangan risiko bencana, baik melalui kebijakan, program mitigasi, maupun kesiapsiagaan masyarakat.

Tabel 3.8
Realisasi Kinerja Tahun 2025 Antar Capaian Kinerja Daerah dengan Pusat (Kementerian/Lembaga)

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT PENCAPAIAN (%)
Pusat (Kementerian/Lembaga)					
1	Indeks Risiko Bencana	Indeks	114,56	117,73	97,31

Berdasarkan surat edaran bersama dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia, Nomor 600.2.1/3674/SJ dan Nomor 2

Tahun 2024 Tentang Pemutakhiran Sasaran Pembangunan Provinsi Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 – 2045.

Target yang ditetapkan belum tercapai sesuai dengan surat edaran. Hal tersebut disebabkan penetapan target IRB Provinsi Kalimantan Timur masih mengacu pada Renstra tahun 2024–2026, sedangkan target yang ditetapkan oleh Pusat melalui surat edaran tanggal 6 Agustus 2024 menjadi dasar bagi Provinsi untuk menetapkan target dalam Renstra tahun 2025–2029.

Tabel 3.9
Realisasi Kinerja Tahun 2025 terhadap target akhir RENSTRA tahun 2024 – 2026 dan RENSTRA tahun 2025 – 2029

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	TINGKAT PENCAPAIAN (%)
RENSTRA Tahun 2024 - 2026					
1.	Indeks Risiko Bencana	Indeks	142,47	117,73	121,01
RENSTRA Tahun 2025 - 2029					
1.	Indeks Risiko Bencana	Indeks	108,83 – 113,76	117,73	92,44 – 96,62

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2025, Indikator kinerja Indeks Risiko Bencana (IRB) Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan capaian yang melampaui target terhadap target akhir yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) BPBD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024 – 2026 yang dipengaruhi oleh mekanisme perhitungan Indeks Risiko Bencana pada tahun 2025, yang telah mengacu pada *baseline* data tahun 2021, sedangkan penetapan target masih mengacu pada perhitungan *baseline* data tahun 2013.

Adapun jika dipadukan dengan target Rencana Strategis (RENSTRA) BPBD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2025 – 2029, maka hasil capaian IRB hampir mendekati target akhir yang telah ditetapkan.

2. SASARAN Peningkatan Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana

Sasaran Strategis :

Peningkatan Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan bagaimana arah kebijakan pada tingkat Provinsi nilai indeks Ketahanan daerah merupakan nilai rata-rata perolehan dari nilai IKD Kabupaten/Kota dengan cara perhitungan sebagai berikut :

Rumus Dasar :

$$IKD = \sum_{i=1}^n (W_n \times D_n)$$

Keterangan :

n = Urutan 1 - 7

W = Indeks Prioritas

D = Bobot Prioritas

Provinsi :

$$\frac{\text{Nilai IKD 10 Kabupaten/Kota}}{\sum \text{Total Kabupaten/Kota se - kaltim}}$$

Tabel 3.10

Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

NO	INDIKATOR KINIERJA	SATUAN	TARGET 2025	TAHUN 2025	
				REALISASI	% CAPAIAN
1	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,733	0,570	77,76

a. Analisa Kinerja

Secara umum, pencapaian Indeks Ketahanan Daerah tahun 2025 belum optimal. Target yang ditetapkan sebesar 0,733 cukup ambisius, namun realisasi hanya mencapai 0,570 atau 77,76% dari target. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup signifikan antara perencanaan dan hasil yang dicapai, sehingga perlu dilakukan evaluasi terhadap efektivitas kebijakan dan program yang telah dijalankan.

Capaian yang belum sesuai target mengindikasikan bahwa program penguatan ketahanan daerah belum sepenuhnya berjalan sesuai rencana. Faktor-faktor seperti keterbatasan sumber daya, koordinasi antar lembaga yang belum maksimal, serta pengaruh kondisi eksternal seperti bencana dan dinamika sosial-ekonomi dapat menjadi penyebab utama rendahnya realisasi. Dengan demikian, diperlukan langkah korektif yang lebih terarah untuk memastikan indikator ketahanan daerah dapat meningkat pada tahun-tahun mendatang.

Meskipun capaian 77,76% menunjukkan adanya progres, hasil ini menegaskan bahwa ketahanan daerah masih perlu ditingkatkan secara signifikan. Pemerintah daerah perlu memperkuat aspek perencanaan, *monitoring*, dan evaluasi, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam mendukung program ketahanan. Dengan perbaikan tata kelola dan optimalisasi sumber daya, diharapkan target kinerja di tahun berikutnya dapat tercapai lebih maksimal dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan ketahanan daerah.

b. Keberhasilan/Kegagalan

Pada tahun 2025, pencapaian Indeks Ketahanan Daerah menunjukkan hasil yang belum sepenuhnya sesuai dengan target yang ditetapkan. Target sebesar 0,733 hanya terealisasi pada angka 0,570 atau 77,76%. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara perencanaan dan pelaksanaan, sehingga kinerja ketahanan daerah belum mencapai standar yang diharapkan.

Dari sisi keberhasilan, capaian 77,76% tetap menunjukkan adanya progres dan upaya nyata dalam memperkuat ketahanan daerah. Angka ini mencerminkan bahwa sebagian program dan kebijakan yang dirancang telah berjalan dan memberikan dampak, meskipun belum optimal. Keberhasilan ini dapat dilihat sebagai pijakan awal untuk perbaikan di tahun-tahun berikutnya, sekaligus bukti bahwa arah kebijakan sudah berada pada jalur yang benar.

Namun demikian, kegagalan dalam mencapai target penuh tidak dapat diabaikan. Realisasi yang lebih rendah dari target mengindikasikan adanya hambatan dalam implementasi kebijakan, baik dari segi keterbatasan sumber daya, koordinasi antar lembaga, maupun faktor eksternal seperti bencana dan dinamika sosial-ekonomi. Kegagalan ini menjadi pelajaran penting bagi pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi menyeluruh, memperkuat tata kelola, serta meningkatkan efektivitas program agar target kinerja di masa mendatang dapat tercapai secara lebih maksimal.

c. Kendala

Hambatan dalam mencapai sasaran kinerja melingkupi arah kebijakan daerah dan administrasi, antara lain:

1. Penanggulangan Bencana merupakan urusan bersama, maka peran aktif penanganan (pra, saat dan pasca), tidak hanya menjadi tanggung jawab kepada salah satu perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi saja, tetapi melibatkan perangkat daerah terkait dan *stakeholder* lainnya.
2. Pembangunan pada daerah rawan bencana yang belum sepenuhnya berbasis pengurangan risiko bencana dapat berpotensi menimbulkan berbagai bencana.
3. Belum optimalnya dalam melakukan Penilaian dan Evaluasi Indeks Ketahanan Daerah (IKD).
4. Belum tepatnya target sasaran yang mempunyai kesesuaian antara tujuan dengan sasaran strategi didalam melaksanakan Penanggulangan bencana.

d. Alternatif Solusi

Alternatif solusi dalam mencapai sasaran kinerja antara lain:

1. Membentuk sinergitas dan komitmen antar Pemerintah Daerah dan *Stakeholder* lainnya untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
2. Memperkuat Analisis Risiko Bencana sebagai dasar dalam perencanaan Pembangunan daerah.
3. Memperkuat pendokumentasian sebagai implementasi pelaksanaan kegiatan di daerah.

4. Sebagai arah kebijakan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam penyusunan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur periode 2025 – 2029, telah melakukan *review* indikator tujuan, sasaran, program dan kegiatan termasuk dalam menetapkan target indikator tersebut.

Tabel 3.11
Perbandingan realisasi Kinerja Tahun 2021 – 2025

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2021 – 2024	REALISASI					% Peningkatan / Penurunan Tahun 2025
				2021	2022	2023	2024	2025	
1	Prosentase penyelenggaraan penanggulangan bencana	%	85	98.04	-	-	-	-	Penurunan
			85	-	100	-	-	-	2.96
			85	-	-	100	-	-	00.00
2	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,633	-	-	-	0,530	-	Penurunan
			0,733	-	-	-	-	0,570	0,04

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja, terlihat adanya perbedaan yang signifikan antara prosentase penyelenggaraan penanggulangan bencana, dan Indeks Ketahanan Daerah, perubahan strategi serta arah kebijakan ini sebagai upaya penyempurnaan untuk lebih efektif dalam mencapai sasaran target untuk mencapai tujuannya.

Strategi dan Arah Kebijakan sasaran tahun 2024 – 2025 mengacu pada Petunjuk Teknis Perangkat Penilaian Indeks Ketahanan Daerah versi 1.1 yang berfokus pada 7 prioritas antara lain Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan Pengkajian Risiko dan perencanaan terpadu, Pengembangan Sistem Informasi, Diklat, dan Logistik, Tematik Kawasan, Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana, Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat bencana, serta Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana.

Tabel 3.12
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Antar Provinsi

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT PENCAPAIAN (%)
Provinsi Kalimantan Timur					

1	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,733	0,570	77,76
Provinsi Kalimantan Utara					
2	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,57	0,57	100

Berdasarkan data perbandingan kinerja tahun 2025, Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan capaian Indeks Ketahanan Daerah sebesar 0,570 dari target 0,733, dengan tingkat pencapaian sebesar 77,76%. Angka ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat upaya nyata dalam memperkuat ketahanan daerah, hasil yang dicapai masih kurang optimal dan belum sesuai dengan target yang ditetapkan. Hal ini menjadi catatan penting bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan evaluasi terhadap strategi dan kebijakan yang telah dilaksanakan.

Jika dilakukan perbandingan dengan Provinsi Kalimantan Utara yang menetapkan target lebih realistis, Provinsi **Kalimantan Timur** menetapkan target lebih ambisius, namun pencapaiannya belum optimal, hal ini menunjukkan pentingnya keseimbangan antara penetapan target yang ambisius dengan kemampuan realisasi di lapangan, perbandingan antarprovinsi tetap penting untuk melihat sejauh mana efektivitas kebijakan di masing-masing wilayah dalam meningkatkan ketahanan daerah. Dengan adanya data komparatif, pemerintah pusat maupun daerah dapat mengidentifikasi praktik terbaik serta faktor penghambat yang mempengaruhi pencapaian indikator.

Tabel 3.13

Realisasi Kinerja Tahun 2025 terhadap target akhir RENSTRA 2024 – 2026 dan Renstra 2025 – 2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	TINGKAT PENCAPAIAN (%)
Renstra Tahun 2024 - 2026					
1	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,833	0,570	68,43
Renstra Tahun 2025 - 2029					
1	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,620	0,570	91,93

Berdasarkan data pada Tabel 3.8, indikator Indeks Ketahanan Daerah menunjukkan capaian yang belum optimal. Target akhir yang ditetapkan dalam

RENSTRA 2024-2026 adalah sebesar 0,833, namun realisasi tahun 2025 hanya mencapai 0,570 atau persentase capaian tersebut hanya sebesar 68,43%, yang berarti terdapat kesenjangan cukup besar antara target strategis dan hasil yang dicapai, sedangkan untuk target yang ditetapkan pada Renstra Tahun 2025 – 2029 mengalami perubahan menjadi sebesar 0,620, dengan realisasi tahun 2025 sebesar 0,570, yang berarti persentase capaian yang diperoleh sebesar 91,93%.

Tabel 3.14
Tingkat Efisiensi Penyerapan Anggaran

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	CAPAIAN (%)	PENYERAPAN ANGGARAN (%)	Tingkat Efisiensi (capaian/penyerapan anggaran)
1	Peningkatan Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	77,76	96,71	0,80

Berdasarkan data pada Tabel 3.9, sasaran strategis Peningkatan Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana diukur melalui indikator Indeks Ketahanan Daerah menunjukkan capaian sebesar 77,76% dengan tingkat penyerapan anggaran mencapai 96,71%. Rasio antara capaian dan penyerapan anggaran menghasilkan tingkat efisiensi sebesar 0,80, yang berarti bahwa setiap rupiah anggaran yang diserap belum sepenuhnya berbanding lurus dengan hasil kinerja yang dicapai.

Analisis ini mengindikasikan bahwa meskipun penyerapan anggaran relatif tinggi, efektivitas penggunaannya masih perlu ditingkatkan. Tingkat efisiensi 0,80 menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara *input* (anggaran) dan *output* (capaian kinerja). Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti perencanaan program yang kurang tepat sasaran, keterbatasan koordinasi antar lembaga, atau adanya kendala eksternal yang memengaruhi pencapaian indikator ketahanan daerah.

Secara keseluruhan, capaian ini memberikan gambaran bahwa pemerintah daerah telah berupaya maksimal dalam memanfaatkan anggaran, namun hasil yang diperoleh belum sepenuhnya optimal. Kedepannya diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas program, penguatan tata kelola anggaran, serta peningkatan kualitas pelaksanaan kegiatan agar tingkat efisiensi dapat ditingkatkan. Dengan demikian, penggunaan anggaran tidak hanya terserap tinggi, tetapi juga mampu menghasilkan kinerja yang sesuai dengan target strategis yang telah ditetapkan.

Tabel 3.15
Efisiensi Penggunaan Anggaran Program/Kegiatan

Tahun	Anggaran Belanja	Realisasi	Nilai Efisiensi	%	Jumlah Program / Kegiatan yang dialokasikan		Total Program / Kegiatan		Ket
					Pro Ram	Kegiatan	Pro Ram	Kegiatan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2021	3.013.732.010	2.395.860.262	617.871.748	20,50	1	4	1	4	-
2022	4.013.345.907	3.843.054.179	170.291.728	4,24	1	4	1	4	-
2023	38.777.112.260	38.247.872.677	529.239.583	1,36	1	4	1	4	-
2024	73.205.884.356	72.493.051.843	712.832.513	0,97	1	4	1	4	-
2025	34.141.460.835	33.018.835.947	1.122.624.888	3,28	1	4	1	4	-

Berdasarkan data pada Tabel 3.10, terlihat bahwa alokasi anggaran belanja mengalami peningkatan signifikan dari tahun 2021 hingga 2024, dengan puncaknya pada tahun 2024 sebesar Rp73,2 miliar. Namun, tingkat efisiensi penggunaan anggaran menunjukkan tren fluktuatif. Pada tahun 2021, nilai efisiensi tercatat cukup tinggi yaitu 20,50%, kemudian menurun drastis menjadi 4,24% di tahun 2022, dan semakin rendah pada tahun 2023 serta 2024 dengan masing-masing 1,36% dan 0,97%. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun anggaran meningkat, efektivitas penggunaannya justru menurun.

Pada tahun 2025, alokasi anggaran kembali mengalami penurunan menjadi Rp. 34,1 miliar dengan realisasi Rp. 33,0 miliar. Nilai efisiensi tercatat sebesar Rp1,12 miliar atau 3,28%. Angka ini memang lebih tinggi dibandingkan tahun 2023 dan 2024, namun masih jauh di bawah capaian efisiensi tahun 2021. Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun penyerapan anggaran relatif tinggi, efektivitas dalam menghasilkan *output* kinerja belum optimal.

Secara keseluruhan, analisa menunjukkan bahwa peningkatan anggaran tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan efisiensi. Penurunan nilai efisiensi dari tahun ke tahun menandakan perlunya evaluasi terhadap perencanaan program, kualitas pelaksanaan kegiatan, serta mekanisme *monitoring* dan evaluasi. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa setiap rupiah anggaran yang dialokasikan benar-benar memberikan dampak nyata terhadap pencapaian sasaran strategis, sehingga efisiensi dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

e. Program yang menunjang keberhasilan

Pada sasaran ini dicapai dengan “Program Penanggulangan Bencana” dimana program ini mempunyai tiga indikator yaitu Persentase Penanganan Pra Bencana, Persentase Penanganan Tanggap Darurat, dan Persentase Penanganan Pemulihan Pasca Bencana.

Pada tabel. 3.9, bahwa besaran alokasi penanggulangan bencana setiap tahun mengalami kenaikan, sehingga memberikan nilai positif bagi penguatan kapasitas pada setiap daerah, dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur mampu mengoptimalkan tugas pendampingan atau percepatan, serta bantuan sebagai koordinator.

Tabel 3.16
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Antar Provinsi

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT PENCAPAIAN (%)
Provinsi Kalimantan Timur					
1	Persentase Penanganan Pra Bencana	%	100	100	100
2	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	%	100	100	100
3	Persentase Pemulihan Pasca Bencana	%	100	100	100
Provinsi Kalimantan Utara					
1	Persentase Lembaga yang memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	%	100	100	100
2	Persentase Kejadian Bencana yang bisa ditangani	%	100	100	100
3	Persentase Pemulihan Daerah Pascabencana	%	100	100	100

A. Kegiatan yang menunjang keberhasilan

Dalam pencapaian indikator pada program diatas didukung dengan empat kegiatan yaitu :

1) Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi

Kegiatan ini mempunyai satu sub kegiatan yaitu Sosialisasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana). Sub kegiatan tersebut merupakan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Provinsi Kalimantan Timur dan juga memberikan penguatan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) pada **indikator 14** “Sarana penyampaian

informasi kebencanaan yang menjangkau langsung masyarakat” dan indikator 15 “Sosialisasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana pada setiap kecamatan di wilayahnya”. Pada tahun 2025 telah dilakukan penganggaran dalam DPA sebesar Rp. 88.722.204 dengan realisasi sebesar Rp. 74.589.670 atau mencapai 84,07%. Dalam pelaksanaan sub kegiatan berupa sosialisasi tentang mekanisme penyampaian informasi kebencanaan melibatkan Perangkat Daerah terkait termasuk kelompok relawan dan Masyarakat.



Gambar 3.1 Dokumentasi Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi

2) Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

Dalam pelaksanaan kegiatan ini berfokus pada kebijakan, pengembangan sistem informasi dan diklat, penanganan tematik kawasan, dan perkuatan kesiapsiagaan bencana. Kegiatan ini merupakan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Provinsi Kalimantan Timur dan memberikan penguatan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) pada **indikator 13** “Rencana Penanggulangan Bencana Daerah”, **indikator 15** “Sosialisasi pencegahan dan kesiapsiagaan bencana pada tiap-tiap kecamatan di wilayahnya”,

indikator 20 “Penyelenggaraan Latihan (gladi) Kesiapsiagaan”, **indikator 22** “Pengadaan kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan”, **indikator 63** “Pengerahan Tim Kaji Cepat ke lokasi bencana”. Pada tahun 2025 telah dilakukan penganggaran dalam DPA sebesar Rp. 20,780,996,354.00 dengan realisasi sebesar Rp. 19,909,479,862.00 atau mencapai 95,81%.



Gambar 3.2 Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota Tahun 2025



Gambar 3.3 Pelaksanaan Pendistribusian Peralatan Penanggulangan Bencana pada BPBD Kabupaten/Kota tahun 2025

3) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Dalam pelaksanaan kegiatan ini berfokus pada pengadaan logistik, dan penanganan bencana. Kegiatan ini merupakan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Provinsi Kalimantan Timur dan memberikan penguatan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) pada **indikator 22** “Pengadaan kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan”, **indikator 63** “Pengerahan Tim Kaji Cepat ke lokasi bencana”, dan **indikator 64** “Pencarian, Pertolongan dan

Evakuasi Korban Bencana”. Pada tahun 2025 telah dilakukan penganggaran dalam DPA sebesar Rp. 812.651.330 dengan realisasi sebesar Rp. 796.027.599 atau mencapai 97,95%.



Gambar 3.4 Dokumentasi Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana BPBD Provinsi Kalimantan Timur



Gambar 3.5 Dokumentasi Kegiatan Pelayanan Pemenuhan Kebutuhan Logistik PB pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur

4) Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana

Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana berfokus pada penyusunan dan implementasi rencana secara komprehensif dalam menghadapi berbagai jenis bencana alam atau buatan manusia dalam bentuk kesiapsiagaan, respon, pemulihan, dan mitigasi. Salah satu *output* yang telah dilaksanakan adalah dengan melakukan *review* Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan menjadi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Sistem Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan. Kegiatan ini juga menjadi penguatan Indeks Ketahanan Daerah (IKD). Pada tahun 2025 telah

dilakukan penganggaran dalam DPA sebesar Rp. 12.459.090.947 dengan realisasi sebesar Rp. 12.238.738.816 atau mencapai 98,23%.



Gambar 3.6 Dokumentasi Kegiatan Pelayanan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana

3. SASARAN Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan layanan publik perangkat daerah

Sasaran Strategis :

Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan layanan publik perangkat daerah

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan tentang terlaksananya akuntabilitas kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang baik.

Indikator sasaran ini adalah “Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah”. Yang dimaksud dengan Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah adalah hasil dari penilaian Inspektur Wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Untuk menghitung realisasi atas indikator ini adalah menggunakan cara perhitungan sebagai berikut:

Hasil Perencanaan Kinerja + Hasil Pengukuran Kinerja + Hasil Pelaporan Kinerja + Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal + Hasil Capaian Kinerja

Tabel 3.17
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2025	TAHUN 2025	
				REALISASI	% CAPAIAN
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Poin	71,00 (BB)	71,95 (BB)	101,33

a. Analisa Kinerja

Capaian Sasaran kinerja sebagaimana pada tabel 3.15, bahwa BPBD Provinsi Kalimantan Timur telah mencapai target sebagaimana yang telah ditetapkan, dimana BPBD Provinsi Kalimantan Timur mampu meningkatkan nilai implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dari Kategori Baik (B) menjadi Sangat Baik (BB).

b. Keberhasilan/Kegagalan

Keberhasilan BPBD Provinsi Kalimantan Timur dalam meningkatkan nilai akuntabilitas kinerja, didorong oleh beberapa faktor diantaranya adalah:

1. Mampu mengevaluasi capaian kinerja secara berkala (setiap triwulan)
2. Mampu mengevaluasi target kinerja pada level sasaran dan Program
3. Mampu meningkatkan komitmen para aparatur untuk melengkapi administrasi kinerja
4. Memberikan kinerja terbaik dengan memberikan *reward*

Tabel 3.18
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021, 2022, 2023, 2024 dan 2025

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2021 – 2024	REALISASI					% Peningkatan / Penurunan Tahun 2025
				2021	2022	2023	2024	2025	
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	80	78,37	-	-	-	-	Peningkatan
			80	-	80,46	-	-	-	Peningkatan
			80	-	-	82,89	-	-	Peningkatan
2.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Poin	70,01 (BB)	-	-	-	70,70 (BB)	-	Peningkatan
			71,00 (BB)	-	-	-	-	71,95 (BB)	Peningkatan

Tabel 3.19
Perbandingan Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2025 Antar Perangkat Daerah
Provinsi Kalimantan Timur

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT PENCAPAIAN (%)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur					
1.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Poin	71,00	71,95	101,33
Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Timur					
2.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Poin	77,50	75,25	97,09

Berdasarkan tabel 3.19 diatas, BPBD Kalimantan Timur Berhasil melampaui target dengan realisasi 71,95 poin dari target 71,00 poin. Tingkat capaian yang diperoleh sebesar lebih dari 100%, hal tersebut menunjukkan kinerja yang baik dan efektif serta sesuai dengan sasaran. Sedangkan pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Timur memiliki target lebih tinggi yaitu sebesar 77,50 poin, namun capaian realisasi sebesar 75,25 poin, hal tersebut menunjukkan tingkat capaian yang diperoleh sebesar 97,09% yang berarti kinerja sudah baik tetapi belum sepenuhnya memenuhi target yang ditetapkan.

Tabel 3.20
Perbandingan Capaian Realisasi Kinerja berdasarkan Renstra 2024 – 2026
dan Renstra 2025 – 2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	TINGKAT PENCAPAIAN (%)
RENSTRA 2024 - 2026					
1.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Poin	72,00 (BB)	71,95 (BB)	99,93
RENSTRA 2025 - 2029					

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	TINGKAT PENCAPAIAN (%)
2.	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Poin	80,45 (BB)	71,95 (BB)	89,43

Berdasarkan tabel 3.20 diatas, Berdasarkan hasil evaluasi kinerja, Pemerintah Daerah dalam periode RENSTRA 2024–2026 berhasil mencapai nilai akuntabilitas sebesar 71,95 poin (BB) dari target 72,00 poin (BB) dengan tingkat pencapaian 99,93%, yang menunjukkan konsistensi pelaksanaan program sesuai arah kebijakan dan komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang akuntabel. Selanjutnya, pada RENSTRA 2025–2029, indikator Nilai AKIP Perangkat Daerah merealisasikan 71,95 poin (BB) dari target 80,45 poin (BB) dengan tingkat pencapaian 89,43%, yang meskipun belum mencapai target akhir, tetap mencerminkan adanya komitmen kuat perangkat daerah dalam meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja. Secara keseluruhan, capaian ini menegaskan tren positif dalam penguatan budaya kinerja, peningkatan kualitas perencanaan berbasis hasil, serta optimalisasi sistem monitoring dan evaluasi, sehingga menjadi landasan penting bagi pencapaian target strategis.

Tabel 3.21
Tingkat Efisiensi Penyerapan Anggaran

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	CAPAIAN (%)	PENYERAPAN ANGGARAN (%)	Tingkat Efisiensi (capaian/penyerapan anggaran)
1.	Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan layanan publik perangkat daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	101,33	86,88	1,16

Capaian kinerja perangkat daerah dalam sasaran strategis peningkatan akuntabilitas kinerja dan layanan publik menunjukkan hasil yang sangat baik, dengan nilai akuntabilitas sebesar 101,33%, disertai tingkat penyerapan anggaran sebesar 86,88%. Rasio efisiensi antara capaian dan penyerapan anggaran mencapai 1,16, yang mengindikasikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan tidak hanya efektif dalam mencapai target, tetapi juga efisien dalam penggunaan sumber daya anggaran. Hasil ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mengoptimalkan tata kelola,

meningkatkan kualitas layanan publik, serta memastikan bahwa setiap alokasi anggaran memberikan hasil yang maksimal bagi pencapaian tujuan strategis.

Tabel 3.22
Efisiensi Penggunaan Anggaran Program/Kegiatan

Tahun	Anggaran Belanja	Realisasi	Nilai Efisiensi	%	Jumlah Program / Kegiatan yang dialokasikan		Total Program / Kegiatan		Ket
					Pro ram	Keg iat an	Pro ram	Keg iat an	
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12
2021	12,661,749,990	10,750,461,267	1,911,288,723	15,10	1	6	1	6	-
2022	14,466,946,420	12,481,797,782	1,985,148,638	13,72	1	4	1	4	-
2023	19.518.548.419	18.390.131.258	1,128,417,161	5,78	1	6	1	6	-
2024	22.986.878.928	21.645.896.838	1,340,982,090	5,83	1	8	1	8	-
2025	54.914.030.052	51.065.405.766	1,075,366,566	1,82	1	8	1	8	-

Berdasarkan data keuangan dan programatik tahun 2021–2025, terlihat adanya tren peningkatan alokasi anggaran belanja yang diikuti dengan realisasi yang relatif tinggi, sehingga menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan. Pada tahun 2021, anggaran sebesar Rp12,66 miliar dengan realisasi Rp10,75 miliar menghasilkan nilai efisiensi Rp1,91 miliar atau 15,10%. Tahun 2022 mengalami peningkatan anggaran menjadi Rp14,46 miliar dengan realisasi Rp12,48 miliar dan efisiensi Rp1,98 miliar (13,72%). Tahun 2023 dan 2024 menunjukkan efisiensi yang lebih rendah, masing-masing 5,78% dan 5,83%, dengan realisasi tetap tinggi mendekati anggaran. Sementara itu, tahun 2025 mencatat lonjakan anggaran hingga Rp54,91 miliar dengan realisasi Rp51,06 miliar, menghasilkan efisiensi Rp1,07 miliar atau 1,82%, yang menandakan semakin optimalnya penggunaan anggaran. Dari sisi program dan kegiatan, jumlah yang dialokasikan konsisten, dengan rata-rata satu program dan enam hingga delapan kegiatan setiap tahun, serta kesesuaian dengan total program dan kegiatan yang dilaksanakan. Secara keseluruhan, data ini mencerminkan peningkatan kapasitas fiskal, efisiensi penggunaan anggaran, serta konsistensi pelaksanaan program dan kegiatan dalam mendukung pencapaian tujuan strategis pemerintah daerah.

c. Program yang menunjang keberhasilan

Pada sasaran ini dicapai dengan “Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi” dimana program ini memiliki dua indikator yaitu Indeks Layanan Sekretariat dan Persentase Layanan yang ditindaklanjuti.

Pada tabel. 3.23, bahwa penunjang keberhasilan capaian kinerja tersebut melingkupi seluruh unsur tingkat Perencanaan, Keuangan, dan Kepegawaian serta Barang Milik Daerah, dimana target indikator tersebut mampu dicapai dengan persentase sebesar 110,41% dan Indikator Persentase Layanan yang ditindaklanjuti mencapai 125,00%.

Tabel 3.23
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Antar Perangkat Daerah
Provinsi Kalimantan Timur

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT PENCAPAIAN (%)
Provinsi Kalimantan Timur					
1	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	85	93,85	110,41
2	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	%	80	100	125,00
Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Timur					
1	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	84	88,17	104,96
2	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	%	100	100	100,00

A. Kegiatan yang menunjang keberhasilan

Dalam pencapaian indikator pada program diatas didukung dengan delapan kegiatan yaitu:

1) Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Dalam kegiatan ini tidak saja menitikberatkan pada pemenuhan dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan, namun juga memperkuat kebijakan perencanaan melalui kegiatan evaluasi antara lain:

1. Kegiatan Resiliensi Penanggulangan Bencana Wilayah Kalimantan

2. Kegiatan Penilaian Panji Keberhasilan ARINDAMA UTAMA Aspek Penanggulangan Bencana
3. Kegiatan Rapat Koordinasi Daerah Penanggulangan Bencana Se-Kalimantan Timur

Pada tahun 2025, telah dilakukan penganggaran dalam DPA sebesar Rp. 497.822.223 dengan realisasi sebesar Rp. 476.626.947 atau mencapai 95,74%.



Gambar 3.7 Pelaksanaan Kegiatan Resiliensi Penanggulangan Bencana Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025



Gambar 3.8 Pelaksanaan Kegiatan Rapat Koordinasi Daerah Penanggulangan Bencana Se – Kalimantan Timur Tahun 2025

2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Dalam kegiatan ini memfokuskan pada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mendapatkan layanan administrasi keuangan. Pada tahun 2025 telah dilakukan penganggaran dalam DPA sebesar Rp. 15.202.221.693 dengan realisasi sebesar Rp. 12.903.758.685 atau mencapai 84,88%.

3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Dalam kegiatan ini memfokuskan pada Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah. Pada tahun 2025 telah dilakukan penganggaran dalam DPA sebesar Rp. 43.960.000 dengan realisasi sebesar Rp. 43.518.000 atau mencapai 98,99%.

4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Dalam kegiatan ini memfokuskan pada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan. Pada tahun 2025 telah dilakukan

penganggaran dalam DPA sebesar Rp. 15.212.247 dengan realisasi sebesar Rp.14.961.000 atau mencapai 98,35%.

5) Administrasi Umum Perangkat Daerah

Dalam kegiatan ini memfokuskan pada Pemenuhan Fasilitas Operasional Kantor. Pada tahun 2025 telah dilakukan penganggaran dalam DPA sebesar Rp. 782.719.205 dengan capaian realisasi sebesar Rp. 781.881.441 atau mencapai 99,89%.

6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Dalam kegiatan ini memfokuskan pada Kelancaran Pelaksanaan Urusan Kantor. Pada tahun 2025 telah dilakukan penganggaran dalam DPA sebesar Rp. 3.344.116.936 dengan realisasi sebesar Rp. 2.946.146.580 atau mencapai 88,10%.

7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Dalam kegiatan ini memfokuskan pada Sarana dan Prasarana Kantor yang berfungsi dengan baik. Pada tahun 2025 telah dilakukan penganggaran dalam DPA sebesar Rp. 886.516.913 dengan realisasi sebesar Rp. 879.677.196 atau mencapai 99,23%.

D. REALISASI ANGGARAN

Realisasi keuangan dalam mencapai sasaran strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.24
Realisasi Anggaran Sesuai Dengan Perjanjian Kinerja

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			PROGRAM	ANGGARAN		
			TARGET	REALISASI	% CAPAIAN		ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)	% CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Peningkatan Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	0,530	0,570	107,54	Program Penanggulangan Bencana	34.141.460.835	33.018.835.947	96,71
2	Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan layanan publik perangkat daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	72,00 (BB)	71,95 (BB)	99,93	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	20.772.569.217	18.046.569.819	86,88

E. DAFTAR PENGHARGAAN TINGKAT NASIONAL

Tabel 3.25
Penilaian Kinerja Terbaik Tingkat Nasional

NO	JENIS PRESTASI	TAHUN	KETERANGAN
1	Juara 2 indeks trantibumlinmas Sub Urusan Bencana	2025	https://indeks-suburusanbencana.kemendagri.go.id/v2/dashboard

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN UMUM

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini diharapkan dapat berperan sebagai alat kendali kualitas kinerja serta alat pendorong terwujudnya Pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*Good Governance*).

Dilihat dari pencapaian kinerja baik pada level Sasaran, Program, kegiatan dan sub kegiatan terdapat indikator yang telah memenuhi target yang telah ditetapkan, tetapi ada juga yang masih belum dapat memenuhi target masing-masing indikator yang telah ditetapkan. Ada beberapa catatan dari perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi dan capaian yang harus ditindaklanjuti:

1. Penyusunan dokumen perencanaan kinerja yang mencakup Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) dan Perjanjian Kinerja (PK) mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur/Rencana Pembangunan Daerah (RPD) periode 2024 – 2026.
2. Melakukan reviu Indikator Kinerja Utama yaitu Indeks Ketahanan Daerah (IKD) disesuaikan dengan tugas dan fungsi/kewenangan BPBD Provinsi Kalimantan Timur dan dapat berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
3. Pengukuran capaian target kinerja masing-masing pegawai mengacu pada target kinerja pada PK/SKP masing-masing Pegawai serta capaian kinerja dilengkapi/diinput data dukung yang relevan pada aplikasi e-SAKIP/e-Kinerja.
4. Laporan Kinerja disusun lebih cermat dan memperhatikan keselarasan khususnya dalam menyajikan informasi analisis kinerja, melakukan Pengumpulan/penginputan data yang andal kinerja Pegawai pada aplikasi e-SAKIP sebagai bahan penyusunan LKJIP sehingga informasi kinerja yang disajikan dalam laporan kinerja (LKjIP) selaras dengan hasil pengukuran pada e-SAKIP, serta dilengkapi informasi mengenai analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.
5. Dokumen laporan kinerja (LKjIP) supaya menyajikan informasi terkait perbandingan realisasi kinerja dalam beberapa tahun terakhir, realisasi kinerja berdasarkan Renstra 2024 – 2026 dan Renstra 2025 – 2029, realisasi kinerja di level antar Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, dan realisasi kinerja di level antar Provinsi.

6. Dokumen laporan kinerja (LKjIP) menyajikan informasi efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja yang diperbandingkan dengan tahun sebelumnya.
7. Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dilakukan secara memadai, yaitu dengan melakukan evaluasi sampai pada sasaran strategis eselon II dan memuat permasalahan/kendala, analisis, dan rekomendasi dalam laporan evaluasi kinerja, sehingga dapat dimanfaatkan untuk perbaikan/peningkatan kinerja.

B. LANGKAH KEDEPAN

Kedepannya Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Kalimantan Timur akan meningkatkan kualitas penyelenggaraan penanggulangan bencana di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun mendatang, dan menekankan keselarasan perencanaan, akurasi pengukuran, ketelitian pelaporan, kedalaman evaluasi, dan komparasi capaian agar BPBD Provinsi Kalimantan Timur semakin akuntabel dan tangguh menghadapi bencana.

C. SARAN

Diharapkan BPBD Provinsi Kalimantan Timur dapat memperkuat sistem perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi, dan capaian kinerja, sehingga mampu mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang lebih akuntabel serta mendukung terwujudnya **“Kaltim Sukses menuju Generasi Emas”**.

Kami menyadari bahwa LKjIP ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, diharapkan masukan dari berbagai pihak guna perbaikan pembuatan laporan pada tahun mendatang. Kepada pihak – pihak yang terkait dan terlibat dalam penyusunan LAKIP ini kami ucapkan terima kasih.

LAMPIRAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA

- 1

Nama Unit Organisasi

:

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Timur
- 2

Tugas

:

a. Menetapkan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan dan kesiapsiagaan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi secara adil, setara dan tepat sasaran;

b. Menetapkan standarisi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

c. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;

d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;

e. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;

f. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran bantuan (uang dan barang) bencana;

g. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan

h. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 3

Fungsi

:

a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien.

b. Pengkoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

c. Pengkomandoan dan pelaksanaan penanganan bencana.
- 4

Indikator Kinerja Utama

:

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN (FORMULASI PERHITUNGAN)	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Peningkatan Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	$\frac{\text{Nilai IKD 10 Kab/Kota}}{\Sigma \text{ Total Kab/Kota se-Kaltim}}$	Data BPBD Prov. Kaltim Data BPBD Kab/kota	Kepala Pelaksana BPBD Prov. Kaltim
2.	Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan layanan publik perangkat daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai	Nilai (Perencanaan kinerja, Pengukuran Kinerja, Laporan Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Capaian Kinerja)	LHE Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur	Kepala Pelaksana BPBD Prov. Kaltim

Samahinda, Oktober 2023

Kepala Pelaksana,



Drs. Agus Tianur, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 196508141998031006

Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024-2026



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jl. M. T. Haryono Telp. 0541-733766, 741040 Fax. 0541-205315
Call/SMS Center : 08115844722
Email: bpbd.kaltimprov@gmail.com, pusdalopsbpbdkaltim@yahoo.co.id
Website: https://bpbd.kaltimprov.go.id/
SAMARINDA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Buyung Dodi Gunawan, S.T., S.H., M.M.
Jabatan : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Provinsi Kalimantan Timur

selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Rudy Mas'ud
Jabatan : Gubernur Kalimantan Timur
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian sanksi berupa :

- a. Berdasarkan Nilai SAKIP :
 1. Predikat CC dikenakan pemotongan TPP sebesar 50%.
 2. Predikat C dikenakan pemotongan TPP sebesar 70%.
 3. Predikat D dikenakan pemotongan TPP sebesar 80%.
- b. Berdasarkan Capaian Kinerja yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja :

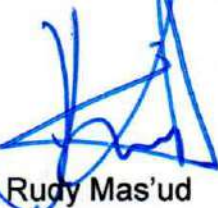
Tambahan pemotongan TPP sebesar 10% bagi Kepala Perangkat Daerah yang tidak mencapai target.

Adapun mekanisme pemotongan berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur tentang Tata Cara Pemberian, Pemotongan, Penghentian Tambahan Penghasilan Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Samarinda, 09 Februari 2026

PIHAK KEDUA

Gubernur Kalimantan Timur,



Rudy Mas'ud

PIHAK PERTAMA

Kepala Pelaksana Badan
Penanggulangan Bencana Daerah,



Buyung Dodi Gunawan, S.T., S.H., M.M.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP 197205282005021001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan Ketahanan Daerah Dalam Menghadapi Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	0,550
2.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Layanan Publik BPBD Provinsi Kaltim	Nilai AKIP Perangkat Daerah	73,45
		Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	82

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 2.869.489.896	APBD
2. Program Penanggulangan Bencana	Rp. 19.838.951.372	APBD
Jumlah	Rp. 22.708.441.268	

Samarinda, 09 Februari 2026

PIHAK KEDUA

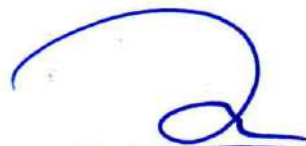
Gubernur Kalimantan Timur,



Rudy Mas'ud

PIHAK PERTAMA

Kepala Pelaksana Badan
 Penanggulangan Bencana Daerah,



Buyung Dodi Gunawan, S.T., S.H., M.M.
 Pembina Tingkat I (IV/b)
 NIP 197205282005021001



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jl. M.T. Haryono Telp. 0541-733766, 741040 Fax. 0541-205315

Call/SMS Center : 0811 58 44722

Email : bpbdkaltimprov@gmail.com, pusdalopsbpbdkaltim@yahoo.co.id Website :

<https://bpbdkaltimprov.go.id/>

SAMARINDA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Yasir, SE., M.Si**

Jabatan : Sekretaris BPBD Provinsi Kalimantan Timur

selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Buyung Dodi Gunawan, S.T., S.H., M.M**

Jabatan : Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Kalimantan Timur

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian sanksi berupa :

a. Berdasarkan Nilai SAKIP :

1. Predikat CC dikenakan pemotongan TPP sebesar 50 %.
2. Predikat C dikenakan pemotongan TPP sebesar 70 %.
3. Predikat D dikenakan pemotongan TPP sebesar 80 %.

Adapun mekanisme pemotongan berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur tentang Tata Cara Pemberian, Pemotongan, Penghentian Tambahan Penghasilan Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Samarinda, Januari 2026

PIHAK KEDUA

Kepala Pelaksana,

Buyung Dodi Gunawan, S.T., S.H., M.M
NIP. 19720528 200502 1 001

PIHAK PERTAMA

Sekretaris,

Yasir, SE., M.Si
NIP. 19730405 199803 1 007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kinerja Layanan Kesekretariatan	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	85 Indeks
		Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti	80 Persen

Program	Anggaran	Keterangan
1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 19.838.951.372,00	APBD

Samarinda, Januari 2026

PIHAK KEDUA

Kepala Pelaksana,



Buyung Dodi Gunawan, S.T., S.H., M.M
NIP. 19720528 200502 1 001

PIHAK PERTAMA

Sekretaris,



Yasir SE., M.Si
NIP. 19730405 199803 1 007



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jl. M.T. Haryono Telp. 0541-733766, 741040 Fax. 0541-205315

Call/SMS Center : 0811 58 44722

Email : bpbd.kaltimprov@gmail.com, pusdalopsbpbdkaltim@yahoo.co.id Website :

<https://bpbd.kaltimprov.go.id/>

SAMARINDA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Tresna Rosano, S.E.**

Jabatan : Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Provinsi Kalimantan Timur

selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Buyung Dodi Gunawan, S.T., S.H., M.M**

Jabatan : Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Kalimantan Timur

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian sanksi berupa :

a. Berdasarkan Nilai SAKIP :

1. Predikat CC dikenakan pemotongan TPP sebesar 50 %.
2. Predikat C dikenakan pemotongan TPP sebesar 70 %.
3. Predikat D dikenakan pemotongan TPP sebesar 80 %.

Adapun mekanisme pemotongan berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur tentang Tata Cara Pemberian, Pemotongan, Penghentian Tambahan Penghasilan Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Samarinda, Januari 2026

PIHAK KEDUA

Kepala Pelaksana,

Buyung Dodi Gunawan, S.T., S.H., M.M
NIP. 19720528 200502 1 001

PIHAK PERTAMA

Kepala Bidang Pencegahan dan
Kesiapsiagaan,

Tresna Rosano, SE
NIP. 19700908 199303 1 011

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Ketangguhan dalam Menghadapi Bencana	Indeks Pra Bencana	0,383 Indeks
		Persentase Dokumen Kebencanaan	50 Persen
		Persentase Penanganan Pra Bencana	100 Persen

Program	Anggaran	Keterangan
1. Penanggulangan Bencana	Rp. 1.070.000.000	APBD

Samarinda, Januari 2026

PIHAK KEDUA

Kepala Pelaksana,



Buyung Dodi Gunawan, S.T., S.H., M.M
NIP. 19720528 200502 1 001

PIHAK PERTAMA

Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan,



Tresna Rosano, SE
NIP. 19700908 199303 1 011



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jl. M.T. Haryono Telp. 0541-733766, 741040 Fax. 0541-205315

Call/SMS Center : 0811 58 44722

Email : bpbd.kaltimprov@gmail.com, pusdalopsbpbdkaltim@yahoo.co.id Website :

<https://bpbd.kaltimprov.go.id/>

SAMARINDA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Sugeng Priyanto, S.Hut., M.Si**

Jabatan : Plh. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi Kalimantan Timur

selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Buyung Dodi Gunawan, S.T., S.H., M.M**

Jabatan : Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Kalimantan Timur

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian sanksi berupa :

a. Berdasarkan Nilai SAKIP :

1. Predikat CC dikenakan pemotongan TPP sebesar 50 %.
2. Predikat C dikenakan pemotongan TPP sebesar 70 %.
3. Predikat D dikenakan pemotongan TPP sebesar 80 %.

Adapun mekanisme pemotongan berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur tentang Tata Cara Pemberian, Pemotongan, Penghentian Tambahan Penghasilan Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Samarinda, Januari 2026

PIHAK KEDUA

Kepala Pelaksana,

Buyung Dodi Gunawan, S.T., S.H., M.M
NIP. 19720528 200502 1 001

PIHAK PERTAMA

Plh. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik,

Sugeng Priyanto, S.Hut., M.Si
NIP. 19690312 199803 1 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

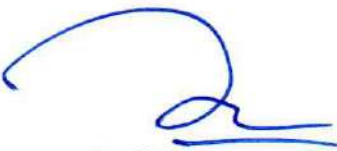
No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Ketangguhan dalam Menghadapi Bencana	Indeks Kedaruratan dan Logistik Bencana	0,115 Indeks
		Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	100 Persen

Program	Anggaran	Keterangan
1. Penanggulangan Bencana	Rp. 1.069.489.896,00	APBD

Samarinda, Januari 2026

PIHAK KEDUA

Kepala Pelaksana,


Buyung Dodi Gunawan, S.T., S.H., M.M
NIP. 19720528 200502 1 001

PIHAK PERTAMA

Plh. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik,


Sugeng Priyanto, S.Hut., M.Si
NIP. 19690312 199803 1 006



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jl. M.T. Haryono Telp. 0541-733766, 741040 Fax. 0541-205315

Call/SMS Center : 0811 58 44722

Email : bpbd.kaltimprov@gmail.com, pusdalopsbpbdkaltim@yahoo.co.id Website :

https://bpbd.kaltimprov.go.id/

SAMARINDA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Andik Wahyudi, S.T., M.M., M.T**

Jabatan : Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi BPBD Provinsi Kalimantan Timur

selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Buyung Dodi Gunawan, S.T., S.H., M.M**

Jabatan : Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Kalimantan Timur

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian sanksi berupa :

a. Berdasarkan Nilai SAKIP :

1. Predikat CC dikenakan pemotongan TPP sebesar 50 %.
2. Predikat C dikenakan pemotongan TPP sebesar 70 %.
3. Predikat D dikenakan pemotongan TPP sebesar 80 %.

Adapun mekanisme pemotongan berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur tentang Tata Cara Pemberian, Pemotongan, Penghentian Tambahan Penghasilan Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Samarinda, Januari 2026

PIHAK KEDUA

Kepala Pelaksana,

Buyung Dodi Gunawan, S.T., S.H., M.M
NIP. 19720528 200502 1 001

PIHAK PERTAMA

Kepala Bidang Rehabilitasi dan
Rekontruksi,

Andik Wahyudi, S.T., M.M., M.T
NIP. 19710329 199202 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Ketangguhan dalam Menghadapi Bencana	Indeks Pasca Bencana	0,055 Indeks
		Persentase Penanganan Pasca Bencana	100 Persen

Program	Anggaran	Keterangan
1. Penanggulangan Bencana	Rp. 730.000.000,00	APBD

Samarinda, Januari 2026

PIHAK KEDUA

Kepala Pelaksana,



Buyung Dodi Gunawan, S.T., S.H., M.M
NIP. 19720528 200502 1 001

PIHAK PERTAMA

Kepala Bidang Rehabilitasi dan
Rekontruksi,



Andik Wahyudi, S.T., M.M., M.T
NIP. 19710329 199202 1 001



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jl. M.T. Haryono Telp. 0541-733766, 741040 Fax. 0541-205315

Call/SMS Center : 0811 58 44722

Email : bpbd.kaltimprov@gmail.com, pusdalopsbpbdkaltim@yahoo.co.id Website :
<https://bpbd.kaltimprov.go.id/>

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SUB BAGIAN UMUM

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **M. Fahrijal Ihsan, S.Pd**

Jabatan: Kepala Sub Bagian Umum BPBD Prov. Kaltim

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Yasir, SE., M.Si**

Jabatan: Sekretaris BPBD Prov. Kaltim

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

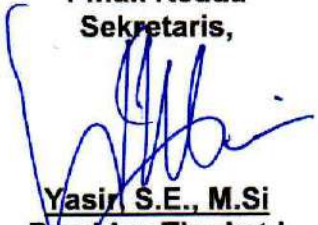
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

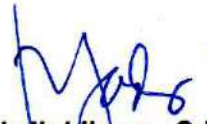
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Samarinda, 02 Januari 2025

Pihak Kedua
Sekretaris,


Yasir S.E., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19730405 199803 1 007

Pihak Pertama
Kepala Sub Bagian Umum,


M. Fahrijal Ihsan, S.Pd
Penata Tingkat I
NIP. 19720330 199803 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SUB BAGIAN UMUM**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Terlaksananya penatausahaan Barang Milik Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persen	100
2	Terlaksananya kinerja pelayanan pegawai dan penataan pegawai	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Persen	100
3	Tersedianya fasilitas Operasional Kantor yang berkualitas	Persentase Pemenuhan Fasilitas Operasional Kantor	Persen	100
4	Tersedianya pengadaan Barang Milik Daerah yang dibutuhkan	Persentase Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	Persen	100
5	Terlaksananya Kelancaran kegiatan urusan kantor	Persentase Kelancaran Pelaksanaan Urusan Kantor	Persen	100
6	Terwujudnya Kesiapan penggunaan Barang Milik Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	Persen	100

Kegiatan

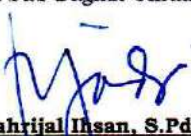
Anggaran

- | | | |
|--|----|---------------|
| 1. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Rp | 9,340,000 |
| 2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Rp | 15,212,247 |
| 3. Administrasi Umum Perangkat Daerah | Rp | 1,075,316,789 |
| 4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Rp | 4,486,342,932 |
| 5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Rp | 588,021,073 |

Samarinda, 02 Januari 2025

Pihak Kedua
Sekretaris,

Yasin, S.E., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 197804051998031007

Pihak Pertama
Kepala Sub Bagian Umum,

M. Fahrizal Ihsan, S.Pd
Penata Tingkat I
NIP. 197203301998031001

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan

Perencana Ahli Muda Sub Bagian Perencanaan Program

2. Tugas

1. Menyajikan bahan penyusunan rencana program Sub Bagian Perencanaan Program berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan acuan.
2. Menyajikan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu.
3. Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik.
4. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan Sub Bagian Perencanaan Program berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas.
5. Menyajikan bahan penyusunan RENSTRA, RENYA, RKA, DPA, DPA, LKIP, LPPD, LKIP sesuai peraturan yang berlaku sebagai acuan kegiatan.
6. Menyajikan bahan koordinasi penetapan standar pelayanan minimal sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk acuan dalam melaksanakan tugas.
7. Melakukan pembinaan dan pelatihan bawahan sesuai peraturan dengan cara memberikan pengubahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai.
8. Memantau perkembangan pelaksanaan kegiatan rutin dan kegiatan berdasarkan pedoman dan peraturan yang ada untuk mengetahui kesesuaiannya dengan perencanaan semula.
9. Menyajikan bahan koordinasi kegiatan perencanaan program dengan instansi terkait berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk optimalisasi tugas.
10. Mengevaluasi dan menyajikan bahan laporan realisasi anggaran secara portofolio berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta upaya penyelesaian masalahnya.
11. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada pimpinan.

3. Fungsi

Mengkoordinasikan pengumpulan dan pengolahan data usulan dan program kegiatan dari masing-masing unit kerja dalam rangka penyusunan program anggaran dan kegiatan sebagai rencana kerja serta melakukan monitoring dan evaluasi untuk memastikan hasil pelaksanaan kegiatan sesuai program.

4. Indikator Kinerja

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Alasan	Cara Perhitungan / Penjelasan	Sumber Data	Pemangung Jawab
1.	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	Persen	Mengukur Ketaatan / Kewajiban penyampaian Dokumen Perencanaan, pengukuhan, pelaporan, monitoring dan evaluasi terhadap perencanaan dan penganggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran x 100% 2 Total dokumen perencanaan penganggaran yang disusun tepat waktu	Dokumen RPPMN Dokumen RPPPD Dokumen RPPMD Dokumen RKPD Provinsi Kalimantan	Perencana Ahli Muda Sub Bagian Perencanaan Program

Sekeloa,

Yasir, S. A. M. SI

Pembina Timpani

NIP. 197304051998031007

Samarinda,

Januari 2025

Perencana Ahli Muda
Sub Bagian Perencanaan Program

A. RAEQ, S. S. M. SI

Pembina

NIP. 197203151998031010

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

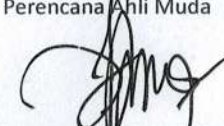
1. Jabatan : Perencana Ahli Muda
2. Tugas :
 1. Menyiapkan Bahan Penyusunan Rencana Program Sub Bagian Keuangan
 2. Menyiapkan Bahan Penyusunan Pelaksanaan Kegiatan Berdasarkan Program Keuangan
 3. Mendistribusikan Tugas kepada Pegawai Staf Sub Bagian Keuangan sesuai Jabatannya
 4. Menyelia dan Memeriksa Anggaran rutin
 5. Meneliti Surat Kelengkapan Permintaan Pembayaran Langsung (SPP) LS Pengadaan Barang dan Jasa
 6. Meneliti Kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, SPP-Gaji dan Tunjangan lainnya.
 7. Melakukan Verifikasi Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
 8. Menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM)
 9. Melakukan Verifikasi Harian atas Permintaan Pembayaran
 10. Melaksanakan Akuntansi SKPD
 11. Menyiapkan Catatan Atas Laporan Keuangan

4. Indikaor Kinerja

No	Sasaran Aktivitas	Indikator Kinerja	Satuan	Alasan	Cara Perhitungan/Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan yang baik sesuai Pedoman	1. Jumlah Dokumen Daftar Gaji dan Tunjangan	Dokumen	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	Angka Absolut	Daftar Gaji dan Tunjangan, Daftar Absensi dan Dokumen DPA	Perencana Ahli Muda
		2. Jumlah Dokumen Administrasi Pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	Terbayarnya Honorarium Pengelola Keuangan SKPD	Angka Absolut	Daftar Pembayaran Honorarium	Perencana Ahli Muda
		3. Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Terlaksananya Pelaksanaan Kegiatan Verifikasi pada semua Bidang	Angka Absolut	Dokumen SPJ Belanja dan DPA	Perencana Ahli Muda
		4. Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Angka Absolut	Dokumen Laporan Kegiatan, Rekon Belanja dan DPA	Perencana Ahli Muda
		5. Jumlah Dokumen Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Dokumen	Terlaksananya Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Angka Absolut	Dokumen Hasil Pemeriksaan dan Tanggapan Pemeriksaan	Perencana Ahli Muda
		6. Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan /Bulanan/Triwulanan/Semesteran DKPD	Dokumen	Terlaksananya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Angka Absolut	Dokumen Laporan Keuangan Rutin	Perencana Ahli Muda
		7. Jumlah Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	Terlaksananya laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Angka Absolut	Dokumen Prognosis Realisasi Belanja	Perencana Ahli Muda

Samarinda, 17 Januari 2025

Perencana Ahli Muda


ZAINUL FADLANSYAH, SKM
 NIP. 19710125 1991031 003



DAFTAR BARANG MILIK DAERAH
PERALATAN DAN MESIN KONDISI BAIK DAN RUSAK
TAHUN 2025

TABEL 1 : REKAP ASET KONDISI BAIK DAN RUSAK : JANUARI S.D MARET 2025

No.	Nama Barang	Existing	Kondisi	
			Baik	Rusak
1	PERALATAN DAN MESIN			
2	COMPACTING EQUIPMENT			
3	Soil Stabilizer	1	-	1
4	ALAT PENGANGKAT			
5	Forklift	1	1	-
6	MESIN PROSES			
7	Water Treatment (Mesin Proses)	1	2	-
8	COMPRESSOR			
9	Portable Compressor	1	1	-
10	ELECTRIC GENERATING SET			
11	Portable Generating Set	1	1	-
12	Electric Generating Set (Dst)	3	3	-
13	POMPA			
14	Portable Water Pump	1	1	-
15	Pompa Air	8	8	-
16	PERLENGKAPAN KEBAKARAN HUTAN			
17	Pompa Portable	2	2	-
18	Kantong Air	12	12	-
19	PERALATAN SAR MOUNTENERING			
20	Peralatan Sar Mountenering (Dst)	1	1	-
21	KENDARAAN DINAS BERMOTOR PERORANGAN			
22	Station Wagon	12	8	4
23	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan (Dst)	1	-	1
24	KENDARAAN BERMOTOR PENUMPANG			
25	Micro Bus (Penumpang 15 S/D 29 Orang)	1	1	-
26	KENDARAAN BERMOTOR ANGKUTAN BARANG			
27	Truck + Attachment	1	1	-
28	Pick Up	3	2	1
29	Yeengler/Trailer	1	1	-
30	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang (Dst)	1	1	-
31	KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA			
32	Sepeda Motor	18	8	10
33	KENDARAAN BERMOTOR KHUSUS			
34	Mobil Ambulance	1	1	-
35	Mobil Tangki Air	2	2	-
36	Mobil Unit Satelite Link Van	1	1	-
37	Kendaraan Toilet	1	1	-
38	Mobil Dapur Lapangan	1	1	-
39	Rescue Car	2	2	-
40	Kendaraan Bermotor Khusus (Dst)	1	1	-

41	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR LAINNYA			
42	Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya (Dst)	1	1	-
43	KENDARAAN TAK BERMOTOR ANGKUTAN BARANG			
44	Gerobak Tarik	2	2	-
45	KENDARAAN TAK BERMOTOR PENUMPANG			
46	Tandu dorong	5	5	-
47	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR UNTUK PENUMPANG			
48	Speed Boat / Motor Tempel	1	1	-
49	Motor Boat	4	4	-
50	ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR UNTUK BARANG			
51	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Untuk Barang (Dst)	11	11	-
52	ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR UNTUK PENUMPANG			
53	Perahu Penumpang	2	2	-
54	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Untuk Penumpang (Dst)	1	1	-
55	ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR KHUSUS			
56	Perahu Karet (Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus)	5	5	-
57	KAPAL TERBANG			
58	Amphibi	1	1	-
59	PERKAKAS KONSTRUKSI LOGAM TERPASANG PADA PONDASI			
60	Mesin Kompresor	1	1	-
61	Mesin Pelubang (Perkakas Konstruksi Logam Terpasang Pada Pondasi)	1	1	-
62	PERKAKAS BENGKEL LISTRIK			
63	Perkakas Bengkel Listrik (Dst)	1	1	-
64	PERKAKAS BENGKEL KAYU			
65	Gergaji Chain Saw	5	5	-
66	PERKAKAS BENGKEL SERVICE			
67	Perkakas Bengkel Service (Dst)	1	1	-
68	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN LAINNYA			
69	Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya (Dst)	11	11	-
70	ALAT UKUR UNIVERSAL			
71	Multitester & Accessorie	1	1	-
72	Global Positioning System	3	3	-
73	ALAT KALIBRASI			
74	Test Generator	1	1	-
75	ALAT UKUR LAIN-LAIN			
76	Alat Ukur Lain-lain (Dst)	13	13	-
77	ALAT PERTANIAN			
78	ALAT PEMELIHARAAN TANAMAN/IKAN/TERNAK			
79	Penyemprot Otomatis (Automatic Sprayer)	13	13	-
80	ALAT PENYIMPAN HASIL PERCOBAAN PERTANIAN			
81	Lemari Penyimpan	20		20
82	Lemari Penyimpan	2	2	-
83	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA			
84	MESIN KETIK			
85	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inci)	9	8	1
86	Mesin Ketik Listrik	2	2	-
87	MESIN HITUNG/MESIN JUMLAH			

88	Mesin Hitung Elektronik/Calculator	1	1	-
89	ALAT REPRODUKSI (PENGKANDAAAN)			
90	Mesin Fotocopy Lainnya	1	1	-
91	ALAT PENYIMPAN PERLENGKAPAN KANTOR			
92	Lemari Besi/Metal	53	45	8
93	Lemari Kayu	5	5	-
94	Rak Besi	20	20	-
95	Filing Cabinet Besi	36	36	-
96	Brandkas	5	5	-
97	Lemari Kaca	7	7	-
98	ALAT KANTOR LAINNYA			
99	CCTV - Camera Control Television System	24	24	-
100	White Board	4	3	1
101	Alat Penghancur Kertas	11	4	7
102	Alat Penghancur Kertas	1		1
103	Mesin Absensi	1	1	-
104	LCD Projector/Infocus	4	4	-
105	Alat Perekam Suara (Voice Pen)	1	1	-
106	Papan Nama Instansi	2	1	-
107	Papan Absen	1	1	-
108	ALAT RUMAH TANGGA			
109	MEUBELAIR			
110	Meja Kerja Besi/Metal	1	1	-
111	Kursi Besi/Metal	1	1	-
112	Meja Rapat	24	24	-
113	Tempat Tidur Besi	57	55	2
114	Meja Resepsionis	5	4	1
115	Meja Makan Besi	1	1	-
116	Kursi Rapat	34	34	-
117	Kursi Tamu	5	5	-
118	Kursi Putar	20	20	-
119	Sofa	13	11	2
120	ALAT PEMBERSIH			
121	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	2	2	-
122	Mesin Pemotong Rumput	2	2	-
123	ALAT PENDINGIN			
124	Lemari Es	12	12	-
125	A.C. Split	29	20	9
126	Kipas Angin	2	2	-
127	Alat Pendingin (Dst)	7	4	3
128	ALAT DAPUR			
129	Rice Cooker (Alat Dapur)	40	-	40
130	Alat Dapur (Dst)	5	5	-
131	ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE)			
132	Televisi	20	13	7
133	Amplifier	1	1	-
134	Equalizer	1	1	-

135	Loudspeaker	1	6	-
136	Sound System	8	6	2
137	Wireless	1	1	-
138	Megaphone	3	3	-
139	Microphone	2	1	1
140	Mic Conference	8	8	-
141	Camera Video	1	1	-
142	Camera film	10	10	-
143	Tiang Bendera	6	6	-
144	Tangga Aluminium	1		1
145	Dispenser	5	1	4
146	Lambang Instansi	1	1	-
147	Handy Cam	7	7	-
148	Bracket Standing Peralatan	3	3	-
149	Alat Rumah Tangga Lainnya (home Use) (Dst)	348	348	-
150	ALAT PEMADAM KEBAKARAN			
151	Alat Pemadam/Portable	1	1	-
152	Pompa Kebakaran/Portable	12	12	-
153	MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT			
154	MEJA KERJA PEJABAT			
155	Meja Kerja Pejabat Eselon II	16	16	-
156	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	5	5	-
157	Meja Kerja Pejabat (Dst)	32	32	-
158	MEJA RAPAT PEJABAT			
159	Meja Rapat Pejabat (Dst)	2	2	-
160	KURSI KERJA PEJABAT			
161	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	27	27	-
162	LEMARI DAN ARSIP PEJABAT			
163	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	4	4	-
164	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR			
165	ALAT STUDIO			
166	PERALATAN STUDIO AUDIO			
167	Audio Mixing Stationer	2	2	-
168	Audio Amplifier	1	1	-
169	Microphone/Wireless MIC	1		1
170	Power Supply Microphone	2	2	-
171	Professional Sound System	1	1	-
172	Uninterruptible Power Supply (UPS)	7	6	1
173	PERALATAN STUDIO VIDEO DAN FILM			
174	Camera Electronic	4	4	-
175	Video Tape Recorder Stationer	1	1	-
176	Power Supply (Peralatan Studio Video Dan Film)	1	1	-
177	Rak Peralatan	3	3	-
178	Tripod Camera	5	5	-
179	Camera Film	1	1	-
180	Lensa Kamera	1	1	-
181	Alat Pemanas Prosesing (Water Heater)	1	1	-

182	Automatic Emergency Light	5		5
183	Layar Film/Projector	7	6	1
184	Camera Under Water	1	1	-
185	Camera Digital	3	3	-
186	Video Conference	1	1	-
187	LCD Monitor	1	1	-
188	PERALATAN STUDIO PEMETAAN/PERALATAN UKUR TANAH			
189	Kompas (Peralatan Studio Pemetaan/peralatan Ukur Tanah)	2	2	-
190	Kamera Udara	2	2	-
191	ALAT STUDIO LAINNYA			
192	Alat Studio Lainnya (Dst)	1	1	-
193	ALAT KOMUNIKASI TELEPHONE			
194	Telephone (PABX)	1		1
195	Handy Talky (HT)	1	1	-
196	Handy Talky (HT)	25	23	2
197	Handy Talky (HT)	3	3	-
198	Handy Talky (HT)	1	1	-
199	Alat Komunikasi Telephone (Dst)	1	1	-
200	ALAT KOMUNIKASI RADIO SSB			
201	Unit Tranceiver Ssb Stationery	3	3	-
202	Alat Komunikasi Radio Ssb (Dst)	5	5	-
203	ALAT KOMUNIKASI RADIO HF/FM			
204	Alat Komunikasi Radio Hf/fm (Dst)	14	13	1
205	ALAT KOMUNIKASI RADIO VHF			
206	Alat Komunikasi Radio Vhf (Dst)	3	3	-
207	ALAT KOMUNIKASI RADIO UHF			
208	Alat Komunikasi Radio Uhf (Dst)	16	16	-
209	ALAT KOMUNIKASI KHUSUS			
210	Alat Komunikasi Khusus (Dst)	5	5	-
211	PERALATAN PEMANCAR			
212	PERALATAN ANTENA HF/SW			
213	Peralatan Antena Hf/sw (Dst)	11	11	-
214	PERALATAN ANTENA UHF			
215	Antene UHF Stationary	1	1	-
216	PERALATAN ANTENA PENERIMA VHF			
217	Antene Penerima VHF	1	1	-
218	SUMBER TENAGA			
219	Genset	5	5	-
220	Solar Cell	7	7	-
221	ALAT KEDOKTERAN UMUM			
222	Tensimeter	2	2	-
223	Termometer Mercury Untuk Suhu Badan	2	2	-
224	Senter	4	4	-
225	Alat Kedokteran Umum (Dst)	4	4	-
226	ALAT KEDOKTERAN BEDAH			
227	Alat Kedokteran Bedah (Dst)	1	1	-
228	ALAT KESEHATAN KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN			

229	Instrument Trolley, Stainless Steel	2	2	-
230	Alat Kesehatan Kebidanan Dan Penyakit Kandungan (Dst)	1	1	-
231	ALAT KEDOKTERAN JANTUNG			
232	Oxygen Tank	2	2	-
233	ALAT KEDOKTERAN GAWAT DARURAT			
234	Emergency Kit	17	17	-
235	ALAT LABORATORIUM MICROBIOLOGI			
236	Stabilizer	2	2	-
237	ALAT LABORATORIUM KIMIA			
238	Pressure Sterilizer	6	6	-
239	ALAT LABORATORIUM KLIMATOLOGI			
240	Pressure Chamber	1	1	-
241	ALAT LABORATORIUM PERTANIAN			
242	Alat Degreening Jeruk Kap 100 Kg	10	10	-
243	ALAT LABORATORIUM BIOLOGI PERAIRAN			
244	Alat Selam	65	65	-
245	ALAT LABORATORIUM LAIN			
246	Meja Kerja	20	20	-
247	ASSEMBLY/COUNTING SYSTEM			
248	Scanner (Assembly/counting System)	1	1	-
249	SYSTEM/POWER SUPPLY			
250	Uninterrupted Power Supply (UPS)	4	4	-
251	PROTEKSI LINGKUNGAN			
252	Sirine (Proteksi Lingkungan)	2	2	-
253	ALAT LABORATORIUM LISTRIK DAN MEKANIK			
254	DC / AC Power Supply	1	1	-
255	PERSENJATAAN NON SENJATA API			
256	ALAT KEAMANAN			
257	Alat Khusus Surta (Survey Dan Pemetaan)	123	123	-
258	Target Drone (Simulasi Pesawat Sasaran Tembak Udara)	1	1	-
259	ALAT DALMAS/ALAT DAKHURA			
260	Kamera Digital	1	1	-
261	KOMPUTER JARINGAN			
262	Mainframe (Komputer Jaringan)	1	1	-
263	PERSONAL KOMPUTER			
264	P.C Unit	25	14	11
265	Lap Top	18	17	1
266	Note Book	37	29	8
267	Tablet PC	1	1	-
268	PERALATAN MAINFRAME			
269	Plotter (Peralatan Mainframe)	1	-	1
270	PERALATAN PERSONAL KOMPUTER			
271	CPU (Peralatan Personal Komputer)	1	1	-
272	Printer (Peralatan Personal Komputer)	26	26	-
273	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	6	6	-
274	External/ Portable Hardisk	3	3	-
275	PERALATAN JARINGAN			

276	Server	3	3	-
277	Router	2	2	-
278	Hub	5	5	-
279	Switch	1	1	-
280	Acces Point	1	1	-
281	PERALATAN KOMPUTER LAINNYA			
282	Peralatan Komputer Lainnya (Dst)	1	1	-
283	ALAT PENDUKUNG PENCARIAN			
284	Tenda	31	31	-
285	ALAT SAR LAINNYA			
286	Alat Sar Lainnya (Dst)	2	2	-
287	PERALATAN PERMAINAN			
288	Alat Tennis Meja	2	1	1
289	Peralatan Permainan (Dst)	2	-	2

1757

1599

163

**DAFTAR BARANG MILIK DAERAH
SARANA DAN PRASARANA BPBD PROVINSI KALTIM
TAHUN 2025**

TABEL 1 : REKAP ASET BPBD PROVINSI KALTIM : JANUARI S.D DESEMBER 2025

No.	Nama Barang	Existing	Kondisi	
			Baik	Rusak
1	PERALATAN DAN MESIN			
2	COMPACTING EQUIPMENT			
3	Soil Stabilizer	1	-	1
4	ALAT PENGANGKAT			
5	Forklift	1	1	-
6	MESIN PROSES			
7	Water Treatment (Mesin Proses)	1	2	-
8	COMPRESSOR			
9	Portable Compressor	1	1	-
10	ELECTRIC GENERATING SET			
11	Portable Generating Set	1	1	-
12	Electric Generating Set (Dst)	3	3	-
13	POMPA			
14	Portable Water Pump	1	1	-
15	Pompa Air	8	8	-
16	PERLENGKAPAN KEBAKARAN HUTAN			
17	Pompa Portable	2	2	-
18	Kantong Air	12	12	-
19	PERALATAN SAR MOUNTENERING			
20	Peralatan Sar Mountenering (Dst)	1	1	-
21	KENDARAAN DINAS BERMOTOR PERORANGAN			
22	Station Wagon	12	8	4
23	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan (Dst)	1	-	1
24	KENDARAAN BERMOTOR PENUMPANG			
25	Micro Bus (Penumpang 15 S/D 29 Orang)	1	1	-
26	KENDARAAN BERMOTOR ANGKUTAN BARANG			
27	Truck + Attachment	1	1	-
28	Pick Up	3	2	1
29	Yeengler/Trailer	1	1	-
30	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang (Dst)	1	1	-
31	KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA			
32	Sepeda Motor	18	8	10
33	KENDARAAN BERMOTOR KHUSUS			
34	Mobil Ambulance	1	1	-
35	Mobil Tangki Air	2	2	-
36	Mobil Unit Satelite Link Van	1	1	-
37	Kendaraan Toilet	1	1	-
38	Mobil Dapur Lapangan	1	1	-
39	Rescue Car	2	2	-
40	Kendaraan Bermotor Khusus (Dst)	1	1	-

41	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR LAINNYA			
42	Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya (Dst)	1	1	-
43	KENDARAAN TAK BERMOTOR ANGKUTAN BARANG			
44	Gerobak Tarik	2	2	-
45	KENDARAAN TAK BERMOTOR PENUMPANG			
46	Tandu dorong	5	5	-
47	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR UNTUK PENUMPANG			
48	Speed Boat / Motor Tempel	1	1	-
49	Motor Boat	4	4	-
50	ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR UNTUK BARANG			
51	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Untuk Barang (Dst)	11	11	-
52	ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR UNTUK PENUMPANG			
53	Perahu Penumpang	2	2	-
54	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Untuk Penumpang (Dst)	1	1	-
55	ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR KHUSUS			
56	Perahu Karet (Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus)	5	5	-
57	KAPAL TERBANG			
58	Amphibi	1	1	-
59	PERKAKAS KONSTRUKSI LOGAM TERPASANG PADA PONDASI			
60	Mesin Kompresor	1	1	-
61	Mesin Pelubang (Perkakas Konstruksi Logam Terpasang Pada Pondasi)	1	1	-
62	PERKAKAS BENGKEL LISTRIK			
63	Perkakas Bengkel Listrik (Dst)	1	1	-
64	PERKAKAS BENGKEL KAYU			
65	Gergaji Chain Saw	5	5	-
66	PERKAKAS BENGKEL SERVICE			
67	Perkakas Bengkel Service (Dst)	1	1	-
68	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN LAINNYA			
69	Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya (Dst)	11	11	-
70	ALAT UKUR UNIVERSAL			
71	Multitester & Accessorie	1	1	-
72	Global Positioning System	3	3	-
73	ALAT KALIBRASI			
74	Test Generator	1	1	-
75	ALAT UKUR LAIN-LAIN			
76	Alat Ukur Lain-lain (Dst)	13	13	-
77	ALAT PERTANIAN			
78	ALAT PEMELIHARAAN TANAMAN/IKAN/TERNAK			
79	Penyemprot Otomatis (Automatic Sprayer)	13	13	-
80	ALAT PENYIMPAN HASIL PERCOBAAN PERTANIAN			
81	Lemari Penyimpan	20		20
82	Lemari Penyimpan	2	2	-
83	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA			
84	MESIN KETIK			
85	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inci)	9	8	1
86	Mesin Ketik Listrik	2	2	-
87	MESIN HITUNG/MESIN JUMLAH			

88	Mesin Hitung Elektronik/Calculator	1	1	-
89	ALAT REPRODUKSI (PENGKANDAAAN)			
90	Mesin Fotocopy Lainnya	1	1	-
91	ALAT PENYIMPAN PERLENGKAPAN KANTOR			
92	Lemari Besi/Metal	53	45	8
93	Lemari Kayu	5	5	-
94	Rak Besi	20	20	-
95	Filing Cabinet Besi	36	36	-
96	Brandkas	5	5	-
97	Lemari Kaca	7	7	-
98	ALAT KANTOR LAINNYA			
99	CCTV - Camera Control Television System	24	24	-
100	White Board	4	3	1
101	Alat Penghancur Kertas	11	4	7
102	Alat Penghancur Kertas	1		1
103	Mesin Absensi	1	1	-
104	LCD Projector/Infocus	4	4	-
105	Alat Perekam Suara (Voice Pen)	1	1	-
106	Papan Nama Instansi	2	1	-
107	Papan Absen	1	1	-
108	ALAT RUMAH TANGGA			
109	MEUBELAIR			
110	Meja Kerja Besi/Metal	1	1	-
111	Kursi Besi/Metal	1	1	-
112	Meja Rapat	24	24	-
113	Tempat Tidur Besi	57	55	2
114	Meja Resepsionis	5	4	1
115	Meja Makan Besi	1	1	-
116	Kursi Rapat	34	34	-
117	Kursi Tamu	5	5	-
118	Kursi Putar	20	20	-
119	Sofa	13	11	2
120	ALAT PEMBERSIH			
121	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	2	2	-
122	Mesin Pemotong Rumput	2	2	-
123	ALAT PENDINGIN			
124	Lemari Es	12	12	-
125	A.C. Split	29	20	9
126	Kipas Angin	2	2	-
127	Alat Pendingin (Dst)	7	4	3
128	ALAT DAPUR			
129	Rice Cooker (Alat Dapur)	40	-	40
130	Alat Dapur (Dst)	5	5	-
131	ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE)			
132	Televisi	20	13	7
133	Amplifier	1	1	-
134	Equalizer	1	1	-

135	Loudspeaker	1	6	-
136	Sound System	8	6	2
137	Wireless	1	1	-
138	Megaphone	3	3	-
139	Microphone	2	1	1
140	Mic Conference	8	8	-
141	Camera Video	1	1	-
142	Camera film	10	10	-
143	Tiang Bendera	6	6	-
144	Tangga Aluminium	1		1
145	Dispenser	5	1	4
146	Lambang Instansi	1	1	-
147	Handy Cam	7	7	-
148	Bracket Standing Peralatan	3	3	-
149	Alat Rumah Tangga Lainnya (home Use) (Dst)	348	348	-
150	ALAT PEMADAM KEBAKARAN			
151	Alat Pemadam/Portable	1	1	-
152	Pompa Kebakaran/Portable	12	12	-
153	MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT			
154	MEJA KERJA PEJABAT			
155	Meja Kerja Pejabat Eselon II	16	16	-
156	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	5	5	-
157	Meja Kerja Pejabat (Dst)	32	32	-
158	MEJA RAPAT PEJABAT			
159	Meja Rapat Pejabat (Dst)	2	2	-
160	KURSI KERJA PEJABAT			
161	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	27	27	-
162	LEMARI DAN ARSIP PEJABAT			
163	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	4	4	-
164	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR			
165	ALAT STUDIO			
166	PERALATAN STUDIO AUDIO			
167	Audio Mixing Stationer	2	2	-
168	Audio Amplifier	1	1	-
169	Microphone/Wireless MIC	1		1
170	Power Supply Microphone	2	2	-
171	Professional Sound System	1	1	-
172	Uninterruptible Power Supply (UPS)	7	6	1
173	PERALATAN STUDIO VIDEO DAN FILM			
174	Camera Electronic	4	4	-
175	Video Tape Recorder Stationer	1	1	-
176	Power Supply (Peralatan Studio Video Dan Film)	1	1	-
177	Rak Peralatan	3	3	-
178	Tripod Camera	5	5	-
179	Camera Film	1	1	-
180	Lensa Kamera	1	1	-
181	Alat Pemanas Prosesing (Water Heater)	1	1	-

182	Automatic Emergency Light	5		5
183	Layar Film/Projector	7	6	1
184	Camera Under Water	1	1	-
185	Camera Digital	3	3	-
186	Video Conference	1	1	-
187	LCD Monitor	1	1	-
188	PERALATAN STUDIO PEMETAAN/PERALATAN UKUR TANAH			
189	Kompas (Peralatan Studio Pemetaan/peralatan Ukur Tanah)	2	2	-
190	Kamera Udara	2	2	-
191	ALAT STUDIO LAINNYA			
192	Alat Studio Lainnya (Dst)	1	1	-
193	ALAT KOMUNIKASI TELEPHONE			
194	Telephone (PABX)	1		1
195	Handy Talky (HT)	1	1	-
196	Handy Talky (HT)	25	23	2
197	Handy Talky (HT)	3	3	-
198	Handy Talky (HT)	1	1	-
199	Alat Komunikasi Telephone (Dst)	1	1	-
200	ALAT KOMUNIKASI RADIO SSB			
201	Unit Tranceiver Ssb Stationery	3	3	-
202	Alat Komunikasi Radio Ssb (Dst)	5	5	-
203	ALAT KOMUNIKASI RADIO HF/FM			
204	Alat Komunikasi Radio Hf/fm (Dst)	14	13	1
205	ALAT KOMUNIKASI RADIO VHF			
206	Alat Komunikasi Radio Vhf (Dst)	3	3	-
207	ALAT KOMUNIKASI RADIO UHF			
208	Alat Komunikasi Radio Uhf (Dst)	16	16	-
209	ALAT KOMUNIKASI KHUSUS			
210	Alat Komunikasi Khusus (Dst)	5	5	-
211	PERALATAN PEMANCAR			
212	PERALATAN ANTENA HF/SW			
213	Peralatan Antena Hf/sw (Dst)	11	11	-
214	PERALATAN ANTENA UHF			
215	Antene UHF Stationary	1	1	-
216	PERALATAN ANTENA PENERIMA VHF			
217	Antene Penerima VHF	1	1	-
218	SUMBER TENAGA			
219	Genset	5	5	-
220	Solar Cell	7	7	-
221	ALAT KEDOKTERAN UMUM			
222	Tensimeter	2	2	-
223	Termometer Mercury Untuk Suhu Badan	2	2	-
224	Senter	4	4	-
225	Alat Kedokteran Umum (Dst)	4	4	-
226	ALAT KEDOKTERAN BEDAH			
227	Alat Kedokteran Bedah (Dst)	1	1	-
228	ALAT KESEHATAN KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN			

229	Instrument Trolley, Stainless Steel	2	2	-
230	Alat Kesehatan Kebidanan Dan Penyakit Kandungan (Dst)	1	1	-
231	ALAT KEDOKTERAN JANTUNG			
232	Oxygen Tank	2	2	-
233	ALAT KEDOKTERAN GAWAT DARURAT			
234	Emergency Kit	17	17	-
235	ALAT LABORATORIUM MICROBIOLOGI			
236	Stabilizer	2	2	-
237	ALAT LABORATORIUM KIMIA			
238	Pressure Sterilizer	6	6	-
239	ALAT LABORATORIUM KLIMATOLOGI			
240	Pressure Chamber	1	1	-
241	ALAT LABORATORIUM PERTANIAN			
242	Alat Degreening Jeruk Kap 100 Kg	10	10	-
243	ALAT LABORATORIUM BIOLOGI PERAIRAN			
244	Alat Selam	65	65	-
245	ALAT LABORATORIUM LAIN			
246	Meja Kerja	20	20	-
247	ASSEMBLY/COUNTING SYSTEM			
248	Scanner (Assembly/counting System)	1	1	-
249	SYSTEM/POWER SUPPLY			
250	Uninterrupted Power Supply (UPS)	4	4	-
251	PROTEKSI LINGKUNGAN			
252	Sirine (Proteksi Lingkungan)	2	2	-
253	ALAT LABORATORIUM LISTRIK DAN MEKANIK			
254	DC / AC Power Supply	1	1	-
255	PERSENJATAAN NON SENJATA API			
256	ALAT KEAMANAN			
257	Alat Khusus Surta (Survey Dan Pemetaan)	123	123	-
258	Target Drone (Simulasi Pesawat Sasaran Tembak Udara)	1	1	-
259	ALAT DALMAS/ALAT DAKHURA			
260	Kamera Digital	1	1	-
261	KOMPUTER JARINGAN			
262	Mainframe (Komputer Jaringan)	1	1	-
263	PERSONAL KOMPUTER			
264	P.C Unit	25	14	11
265	Lap Top	18	17	1
266	Note Book	37	29	8
267	Tablet PC	1	1	-
268	PERALATAN MAINFRAME			
269	Plotter (Peralatan Mainframe)	1	-	1
270	PERALATAN PERSONAL KOMPUTER			
271	CPU (Peralatan Personal Komputer)	1	1	-
272	Printer (Peralatan Personal Komputer)	26	26	-
273	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	6	6	-
274	External/ Portable Hardisk	3	3	-
275	PERALATAN JARINGAN			

276	Server	3	3	-
277	Router	2	2	-
278	Hub	5	5	-
279	Switch	1	1	-
280	Acces Point	1	1	-
281	PERALATAN KOMPUTER LAINNYA			
282	Peralatan Komputer Lainnya (Dst)	1	1	-
283	ALAT PENDUKUNG PENCARIAN			
284	Tenda	31	31	-
285	ALAT SAR LAINNYA			
286	Alat Sar Lainnya (Dst)	2	2	-
287	PERALATAN PERMAINAN			
288	Alat Tennis Meja	2	1	1
289	Peralatan Permainan (Dst)	2	-	2

1757

1599

163